

Pekerja Rumahan di Indonesia

**Hasil dari Penelitian Pemetaan Pekerja
Rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan
Banten**

Rangkuman eksekutif

Pekerjaan rumahan bukanlah hal baru dan pekerja rumahan seringkali disebut sebagai 'pekerja sub-kontrak' di Indonesia. Pekerjaan rumahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh keluarga, sebagian besar perempuan, dari generasi ke generasi, dengan nenek, ibu dan anak perempuan terlibat dalam pekerjaan rumahan. Meskipun sudah ada untuk waktu yang lama, mereka sebagian besar tidak terlihat dan tidak dipahami dengan baik. Beberapa upaya telah dilakukan di masa lalu untuk memahami dan meningkatkan kondisi pekerja rumahan di Indonesia termasuk penelitian serta kerja-kerja advokasi oleh kelompok-kelompok pekerja berbasis rumahan yang didukung oleh organisasi internasional dan organisasi masyarakat sipil terkait. Namun, isu pekerjaan rumahan belum mendapat cukup perhatian para pembuat kebijakan, pengusaha, serikat pekerja dan masyarakat umum, dan pekerja rumahan tetap tidak terlihat di statistik resmi dan undang-undang ketenagakerjaan dan kurang ada informasi tentang kondisi kerja mereka. Juga tidak ada konsensus dan pemahaman bersama tentang status pekerja rumahan, dan pekerja rumahan seringkali dirancukan dengan pekerja mandiri, pekerja rumah tangga, atau bahkan seseorang yang melaksanakan beberapa kegiatan untuk mengisi waktu.

Guna untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu pekerjaan rumahan untuk perencanaan dan perumusan kebijakan dan program di Indonesia, proyek ILO/MAMPU berupaya meningkatkan kesadaran tentang pekerjaan rumahan dan meningkatkan ketersediaan data tentang pekerja rumahan. Proyek bekerja sama secara dekat dengan Badan Pusat Statistik Indonesia untuk membahas pencantuman pertanyaan tambahan yang memungkinkan identifikasi pekerja berbasis rumahan dalam kuesioner survei angkatan kerja rutin. Selain itu, proyek melakukan pemetaan pekerja rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten untuk memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi kerja pekerja rumahan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan terkait termasuk pembuat kebijakan, pengusaha, serikat pekerja, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan organisasi pekerja rumahan dalam upaya mereka meningkatkan kondisi hidup dan kondisi kerja pekerja rumahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan *stratified random sampling* untuk mewawancarai 3.010 pekerja rumahan perempuan di 297 desa di enam provinsi di Indonesia.

Penelitian ini menemukan bahwa pekerja rumahan di Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang sama yang lazim untuk pekerja rumahan di seluruh dunia. Mereka dapat ditemukan di berbagai industri dan sektor melaksanakan berbagai jenis pekerjaan di rumah atau di rumah seorang teman. Mereka cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan masyarakat pada umumnya, persepsi yang terbatas tentang kesetaraan gender, dan lebih dari 80 persen perempuan yang diwawancarai sudah menikah di mana suami mereka memiliki pekerjaan lepas atau jangka pendek di bidang pekerjaan berketerampilan rendah atau tidak berketerampilan. Penelitian ini juga menemukan

perempuan penyandang disabilitas di seluruh provinsi kecuali di Yogyakarta (1 persen dari perempuan yang diwawancarai). Mereka memasuki pekerjaan rumahan melalui jaringan sosial misalnya teman dan tetangga dan pekerjaan rumahan merupakan sumber utama pendapatan mereka. Rata-rata lama bekerja sebagai pekerja rumahan adalah 5 tahun, dan sekitar separuh dari perempuan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka ingin mendirikan bisnis sendiri jika diberi kesempatan. Dua puluh persen menyatakan mereka akan lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu dan sebagian kecil sampel mengungkapkan preferensi mereka untuk bekerja di sektor formal atau melanjutkan pendidikan.

Hampir semua perempuan tidak memiliki kontrak tertulis tetapi 47 persen perempuan tersebut memiliki perjanjian lisan. Meskipun demikian, para perempuan tersebut bekerja sesuai dengan pesanan dan spesifikasi dari pemberi kerja atau perantara mereka. Sementara sebagian diberi instruksi tentang bagaimana cara mengerjakan pekerjaan dengan pelatihan sambil bekerja, para pekerja perempuan jarang menerima pelatihan. Mayoritas perempuan menerima bahan baku tetapi kurang lazim bagi pekerja rumahan untuk menerima peralatan dari pemberi kerja atau perantara mereka, dan mereka tidak mendapatkan kompensasi untuk biaya terkait produksi. Hampir 60 persen pekerja rumahan memiliki sedikit pengetahuan tentang perusahaan yang mempekerjakan mereka atau sumber pemberi pesanan produksi. Delapan belas persen pekerja memproduksi untuk pasar internasional.

Pekerja rumahan dibayar dengan besaran per satuan dan besarnya ditentukan oleh pemberi kerja tanpa negosiasi. Meskipun jam kerjanya panjang dengan lebih dari 30 persen perempuan tersebut bekerja lebih dari 48 jam atau lebih per minggu, mendapatkan penghasilan tepat di atas tingkat kemiskinan dan kurang dari 50 persen dari upah rata-rata. Sebagian besar pekerja menerima pembayaran pada saat pengiriman produk mereka tetapi banyak mengalami keterlambatan dalam menerima pembayaran.

Keuntungan utama pekerjaan rumahan meliputi kemampuan untuk memperoleh penghasilan dan bahwa pekerjaan rumahan memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi atau pengasuhan lainnya. Tantangan utama meliputi penghasilan rendah dan pesanan kerja yang tidak stabil. Sebagian memandang terbatasnya ruang di rumah karena pekerjaan rumahan sebagai tantangan.

Sementara sebagian besar pekerja rumahan melaporkan kesehatan yang baik, tetapi masih melaporkan berbagai keluhan kesehatan termasuk sesekali demam, batuk dan sakit kepala. Mereka melaporkan bahwa mereka tetap bekerja sekalipun sedang cedera atau sakit. Mayoritas pekerja rumahan tidak memiliki akses ke program bantuan sosial dan asuransi sosial pemerintah.

Para pekerja rumahan tidak terhubung dengan baik dengan kelompok yang mendukung hak-hak di tempat kerja dan kelompok yang paling lazim diikuti oleh pekerja rumahan adalah kelompok keagamaan tradisional yang biasanya tidak menyediakan platform untuk diskusi tentang isu-isu terkait pekerjaan. Pekerja rumahan pada umumnya tidak bernegosiasi dengan pemberi kerja karena khawatir akan kehilangan pekerjaan.

Penelitian ini memberikan penjelasan tentang kondisi pekerja rumahan 'yang jelas menunjukkan perlunya perbaikan. Pekerja rumahan adalah pekerja dan mereka memainkan peran penting dalam menafkahi keluarga mereka dan mempertahankan mata pencaharian mereka. Pekerja rumahan seharusnya tidak lagi tak terlihat. Keberadaan dan kontribusi mereka harus diakui sehingga mereka dapat memiliki peningkatan akses ke perlindungan hukum dan sosial dan berjuang menuju kerja layak. Dalam hal ini, komitmen yang kuat diperlukan dari semua pihak termasuk pengambil kebijakan, pengusaha, serikat pekerja, organisasi pekerja rumahan dan organisasi dukungan mereka. Rekomendasi kunci untuk mempromosikan kerja layak bagi pekerja rumahan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kumpulkan data tentang pekerja rumahan.
2. Kenali pekerja rumahan sebagai pekerja.
3. Berdayakan pekerja rumahan untuk mengatasi defisit kerja layak.
4. Perluas perlindungan sosial untuk pekerja rumahan.
5. Promosikan praktek yang bertanggung jawab dalam rantai pasokan.
6. Promosikan kesetaraan gender dan non-diskriminasi di kalangan masyarakat umum dan para pemangku kepentingan kunci untuk menciptakan sebuah lingkungan yang memungkinkan bagi perempuan maupun laki-laki untuk mengakses kerja layak.

Daftar isi

Rangkuman eksekutif.....	2
1. Pendahuluan	8
1.1 Latar belakang.....	8
1.2 Ruang lingkup penelitian pemetaan pekerja rumahan.....	10
1.3 Metodologi dan sampel	12
2. Kerangka regulasi di Indonesia.....	17
3. Konteks ekonomi dan sosial.....	18
4. Karakteristik pekerja rumahan perempuan dalam sampel.....	21
5. Jenis pekerjaan pekerja rumahan	28
6. Pengaturan kerja pekerja rumahan	30
6.1 Perjanjian kerja	30
6.2 Tempat kerja	31
6.3 Spesifikasi, instruksi dan pelatihan	31
6.4 Biaya produksi.....	33
6.5 Hubungan ke pasar	35
7. Kondisi kerja pekerja rumahan	38
7.1 Waktu kerja.....	38
7.2 Upah pekerja rumahan	39
7.3 Mekanisme pembayaran pekerja rumahan.....	43
7.4 Keuntungan dan kesulitan	45
8. Perlindungan sosial dan keselamatan dan kesehatan pekerja rumahan.....	46
9. Asosiasi dan perundingan bersama	51
10. Kesimpulan dan rekomendasi	53
Daftar referensi.....	61

Daftar tabel

Tabel 1: Deskripsi sampel menurut geografi.....	13
Tabel 2: Indikator penduduk, kemiskinan dan ketidaksetaraan, 2013	19
Tabel 3: Indikator kunci PDB regional, 2013	19
Tabel 4: Indikator kunci pasar kerja	20
Tabel 5: Tingkat pendidikan pekerja rumahan berbanding dengan rata-rata provinsi (persen)	21
Tabel 6: Karakteristik sampel kunci.....	22
Tabel 7: Rata-rata ukuran rumah tangga dan usia perkawinan	23
Tabel 8: Sikap terhadap kesetaraan gender (%)	24
Tabel 9: Kegiatan utama responden selama bulan sebelumnya	26
Tabel 10: Jumlah tahun sebagai pekerja rumahan	27
Tabel 11: Pekerjaan menurut sub-sektor industri untuk pekerja rumahan.....	28

Tabel 12: Contoh kegiatan per klasifikasi industri	29
Tabel 13: Pekerjaan pekerja rumahan.....	30
Tabel 14: Jenis perjanjian pekerja rumahan	31
Tabel 15: Pekerja rumahan mendapatkan spesifikasi atau instruksi.....	32
Tabel 16: Pekerja rumahan mendapatkan pelatihan.....	32
Tabel 17: Pekerja rumahan menerima bahan	33
Tabel 18: Pekerja rumahan yang menerima peralatan.....	34
Tabel 19: Pengetahuan pekerja rumahan tentang perusahaan untuk mana mereka memproduksi	36
Tabel 20: Rata-rata waktu kerja pekerja rumahan dibandingkan dengan rata-rata provinsi.....	38
Tabel 21: Rata-rata jam kerja untuk pekerja rumahan dan perempuan di angkatan kerja	38
Tabel 22: Rata-rata jam kerja per minggu menurut sektor untuk pekerja rumahan	39
Tabel 23: Upah bulanan rata-rata pekerja rumahan (Rp.)	40
Tabel 24: Upah rata-rata di sektor manufaktur untuk karyawan biasa dan pekerja rumahan (Rp.)	41
Tabel 25: Upah rata-rata menurut sektor untuk pekerja rumahan (Rp.).....	41
Tabel 26: Contoh besaran upah per satuan	43
Tabel 27: Waktu pembayaran dan pekerjaan rumahan	45
Tabel 28: Kesulitan yang dihadapi oleh pekerja rumahan	46
Tabel 29: Pekerja rumahan yang mendapat program bantuan dan asuransi sosial.....	47
Tabel 30: Hari-hari yang hilang karena kecelakaan kerja oleh pekerja rumahan.....	49
Tabel 31: Pekerja rumahan dan perundingan	52

Daftar gambar

Gambar 1: Pasar untuk mana pekerja rumahan memproduksi	37
--	----

Daftar kotak

Kotak 1: Definisi dua kategori pekerja berbasis rumahan.....	10
Kotak 2: Pekerjaan informal: Hirarki penghasilan dan resiko kemiskinan menurut status kerja dan jenis kelamin.....	11
Kotak 3: Mengapa saya memulai menjadi pekerja rumahan	27
Kotak 4: Hubungan rantai pasokan: kasus Ibu Dina, Banten.....	36
Kotak 5: Kasus Ibu Samiah dan Ibu Hani di Banten dan Ibu Sintha dan Ibu Lilis di Sumatera Utara	42
Kotak 6: Pekerja rumahan dan negosiasi di Jawa Barat	52
Kotak 7: Pekerja rumahan dan negosiasi di Banten	53

Daftar singkatan

APINDO	Asosiasi Pengusaha Indonesia
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik
ILO	International Labour Organization (Organisasi Perburuhan Internasional)
Kemenaker	Kementerian Tenaga Kerja
PDB	Produk Domestik Bruto
Rp.	Rupiah
UKM	Usaha Kecil dan Menengah

Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
USD	United States Dollar

Ucapan terima kasih

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari Proyek ILO/MAMPU yang didanai oleh Australia tentang Akses Perempuan ke Lapangan Kerja dan Kerja Layak di Indonesia. Penelitian ini merupakan sebuah upaya kolaboratif oleh:

- Tim ILO/MAMPU, Aya Matsuura, Kepala Penasehat Teknis, Novita Hendrina, *National Officer* di Medan, Hiranía Cornelia, *National Officer* bidang Monitoring dan Evaluasi dan Berbagi Pengetahuan, Agnes Gurning, *National Officer* bidang Gender, Advokasi dan Pengorganisasian, Tolhas Damanik, *National Officer* bidang Sektor Swasta dan Disabilitas, Lilis Suryani, *National Officer* di Surabaya, Maya Iskarini, asisten Administrasi dan Keuangan, Nun Zairida, asisten Administrasi.
- Para penulis laporan, Emma Allen, Ekonom Pasar Kerja ILO di Jakarta, Elisabeth Siahaan, Universitas Sumatera Utara, Y. Wasi Gede Puraka, INKRISPENA di Jakarta, Institute for Research and Empowerment (IRE) di Yogyakarta dan Centre for Human Rights Studies of University of Surabaya (CHRUS) di Jawa Timur.
- Para petugas Survey yang berasal dari pusat-pusat penelitian yang bekerja sama, serta Mitra Pelaksana Proyek, BITRA dan MWPRI.

Penelitian ini mendapatkan manfaat dari masukan berharga yang diberikan oleh berbagai kolega dan terima kasih sebanyak-banyaknya disampaikan kepada:

- Nelien Haspels, Spesialis Gender Senior, ILO Bangkok
- Joni Simpson, Spesialis Gender, ILO Bangkok
- Sukti Dasgupta, Ekonom Senior, ILO Bangkok
- Raphael Crowe, Spesialis Gender Senior, ILO Jenewa
- Robert Kyloh, Penasehat Ekonomi Senior, ILO Jenewa
- Mustafa Hakki Ozel dan David Hunter, Badan Statistik ILO

Proyek juga mengucapkan terima kasih kepada para pekerja rumahan yang meluangkan waktu untuk berperan serta di dalam penelitian ini berbagi pengalaman dan cerita mereka.

Tentang para penulis

Emma Allen adalah penulis utama laporan ini. Dia adalah seorang ekonom pasar kerja di Kantor ILO Jakarta. Dia fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan promosi ketenagakerjaan, dengan fokus khusus pada kebijakan ketenagakerjaan, analisis pasar kerja dan tren ketenagakerjaan. Dia menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang ekonomi makro, dengan spesialisasi di bidang kebijakan ketenagakerjaan dan penilaian kebijakan berbasis bukti.

Dr Elisabeth Siahaan, SE, M.Ec, mendukung pengumpulan data dan pengembangan laporan ini untuk Sumatera Utara. Dia adalah seorang dosen di Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara. Penulis diakui sebagai staf pengajar profesional oleh IPB. Penulis telah menerbitkan banyak makalah penelitian khususnya di bidang pengembangan usaha.

Y. Wasi Gede Puraka, S.Sos, M.Hum, mendukung pengumpulan data dan pengembangan laporan ini untuk Jawa Barat dan Banten. Dia adalah Direktur Eksekutif INKRISPENA (Pusat Penelitian Krisis dan Strategi Pengembangan Alternatif). Penulis merupakan staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Universitas Indonesia. Bidang penelitiannya mencakup hubungan kerja, konflik sosial, filsafat sosial, dan monitoring dan evaluasi.

The Institute for Research and Empowerment (IRE) mendukung pengumpulan data dan pengembangan laporan ini untuk Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sukasmanto, SE, M.Si, merupakan peneliti utamanya dan dia memiliki Gelar Sarjana dan Master di bidang Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Fokus penelitiannya adalah pada usaha kecil menengah (UKM), kewirausahaan sosial, manajemen keuangan, dan manajemen keuangan publik. Dina Mariana, Weningtyas Kismorodati, Muhammad Imam Zamroni, Sunaryo Hadi Wibowo dan Bridget Keenan, yang juga bekerja di IRE, mendukung pengumpulan data dan tugas-tugas analisis untuk laporan ini.

The Centre for Human Rights Studies of University of Surabaya (CHRUS) mendukung pengumpulan data dan pengembangan laporan ini untuk Jawa Timur. Dian Noeswantari merupakan peneliti utamanya dan dia berpengalaman dalam penelitian yang berkaitan dengan anak-anak, perempuan, gender, usaha, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aloysia Vira Herawati, Inge Christanti, dan Joaquim Valentino Lede Rohi, yang juga bekerja di CHRUS, mendukung pengumpulan data dan tugas-tugas analisis untuk laporan ini.

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Pekerjaan rumahan bukanlah hal baru dan pekerja rumahan seringkali disebut sebagai ‘pekerja sub-kontrak’ di Indonesia. Pekerjaan rumahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh keluarga, sebagian besar perempuan, dari generasi ke generasi, dengan nenek, ibu dan anak perempuan terlibat dalam pekerjaan rumahan. Ada penelitian yang menyatakan bahwa pekerjaan rumahan sudah ada sejak tahun 1928 di industri tekstil¹. Meskipun sudah ada untuk waktu yang lama, mereka sebagian besar tidak terlihat dan tidak dipahami dengan baik

¹ M. Oey-Gardiner, E. Suleeman, I. Tjandraningsih, W. Hartanto dan H. Wijaya (2007), “Women and children homeworkers in Indonesia”, S. Mehrotra dan M. Biggeri (2007), “Asian Informal Workers. Global risks, local protection”, (Routledge, AS dan Kanada).

tetapi sebagian orang berpendapat bahwa pekerjaan rumahan merupakan fenomena signifikan di pasar kerja².

Sementara pekerjaan rumahan merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak orang, dan pekerja rumahan memberi kontribusi penting untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat, mereka menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kondisi hidup dan kerja. Pekerjaan rumahan ditandai dengan upah rendah dan jam kerja panjang. Mereka bekerja di rumah terisolasi dari orang lain, sehingga mereka memiliki akses terbatas ke informasi dan sumber daya lainnya dan kurang memiliki suara dan perwakilan untuk berjuang menuju kerja layak. Mereka juga memiliki perlindungan hukum dan sosial yang terbatas dan mereka merupakan salah satu pekerja paling tidak beruntung.

Telah ada upaya-upaya untuk meningkatkan keterlihatan mereka dan meningkatkan kondisi kerja mereka di Indonesia sejak sekitar tahun 1990-an, tetapi perhatian terhadap isu-isu pekerja rumahan tidak selalu berkelanjutan. Dari tahun 1988-1996, ILO melaksanakan sebuah proyek regional yang meliputi Indonesia, Filipina dan Thailand yang menyoroti pekerja perempuan miskin di daerah pedesaan atau migran di daerah perkotaan yang bekerja dalam pekerjaan rumahan dengan dukungan dari Pemerintah Denmark. Proyek ini bertujuan untuk memiliki data dan meningkatkan kesadaran dan pengakuan terhadap pekerjaan rumahan di kalangan pihak-pihak terkait, mempromosikan pemberlakuan efektif undang-undang dan kebijakan ketenagakerjaan terkait dan mendorong organisasi pekerja rumahan perempuan³. Pada tahun 1996, beberapa LSM⁴ dan akademisi⁵ mendirikan Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI) di Malang, Jawa Timur dengan tujuan untuk memperbaiki situasi sosial-ekonomi pekerja berbasis rumahan dan pekerja perekonomian informal Indonesia. Sejak itu, MWPRI telah terlibat dalam pengembangan organisasi PR dan mewakili PR di tingkat lokal, nasional, sub-regional dan internasional, meskipun skala kegiatannya bergantung pada ketersediaan sumber daya eksternal⁶. Beberapa penelitian terkait dengan pekerja rumahan telah dilakukan di masa lalu tetapi sebagian besar berskala kecil dan menerapkan berbagai definisi berbeda tentang pekerja rumahan, yang meliputi pekerja keluarga tidak dibayar atau pekerja mandiri, dan data komprehensif tentang pekerja rumahan sebagaimana didefinisikan di Konvensi Pekerjaan Rumahan No. 177 (1996) tidak tersedia untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi pekerja rumahan di Indonesia. Oleh karena itu, isu-isu pekerjaan rumahan sebagian besar tetap tak terlihat dan pemahaman berbeda tentang situasi dan status pekerja rumahan adalah lumrah hingga saat ini di Indonesia.

Pada tahun 2012, ILO menjadi bagian dari MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan), sebuah program kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia, untuk meningkatkan akses ke pekerjaan dan perlindungan sosial dan mata

² Ibid.

³ ILO (1994), "Home work", (ILO, Jenewa).

⁴ Yayasan Pengembangan Pedesaan, Yayasan Bina Swadaya Yogyakarta, Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia, dan Lembaga Daya Darma.

⁵ LPM Universitas Merdeka.

⁶ N. Haspels dan A. Matsuura (2015), "Home-based workers: Decent work and social protection through organization and empowerment. Experiences, good practices and lessons from home-based workers and their organizations", (ILO, Jakarta).

pencaharian bagi perempuan miskin di Indonesia di wilayah geografis terpilih. Berdasarkan penilaian awal dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, proyek ILO/MAMPU bekerjasama dengan konstituen ILO tripartit (Kementerian Tenaga Kerja, APINDO, dan Serikat Pekerja) mulai fokus pada peningkatan kondisi kerja pekerja rumahan, termasuk perempuan penyandang disabilitas di dalam pekerjaan berbasis rumahan pada tahun 2014.

Menyadari perlunya data tentang pekerja rumahan untuk meningkatkan keterlihatan mereka dan agar memiliki pemahaman yang jelas tentang kondisi kerja mereka, kegiatan proyek ILO/MAMPU mencakup peningkatan kesadaran tentang pekerjaan rumahan dan peningkatan ketersediaan data tentang pekerja rumahan. Untuk meningkatkan ketersediaan data, proyek bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Indonesia untuk membahas pencantuman pertanyaan-pertanyaan tambahan yang memungkinkan identifikasi pekerja berbasis rumahan dalam kuesioner survei angkatan kerja rutin. Selain itu, proyek melakukan pemetaan pekerja rumahan di provinsi-provinsi terpilih untuk mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi kerja pekerja rumahan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan terkait termasuk para pengambil kebijakan, pengusaha, serikat pekerja, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan organisasi pekerja rumahan dalam upaya mereka meningkatkan kondisi hidup dan kerja pekerja rumahan di Indonesia. Laporan ini menyajikan temuan-temuan dari penelitian pemetaan tersebut.

1.2 Ruang lingkup penelitian pemetaan pekerja rumahan

Proyek ILO/MAMPU bekerja sama dengan para peneliti nasional untuk melaksanakan penelitian pemetaan pekerja rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten antara akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami situasi dan kondisi kerja pekerja rumahan, dan ini berguna untuk memahami perbedaan antara pekerja berbasis rumahan mandiri dan pekerja berbasis rumahan bergantung (yang disebut sebagai pekerja rumahan) (Kotak 1).

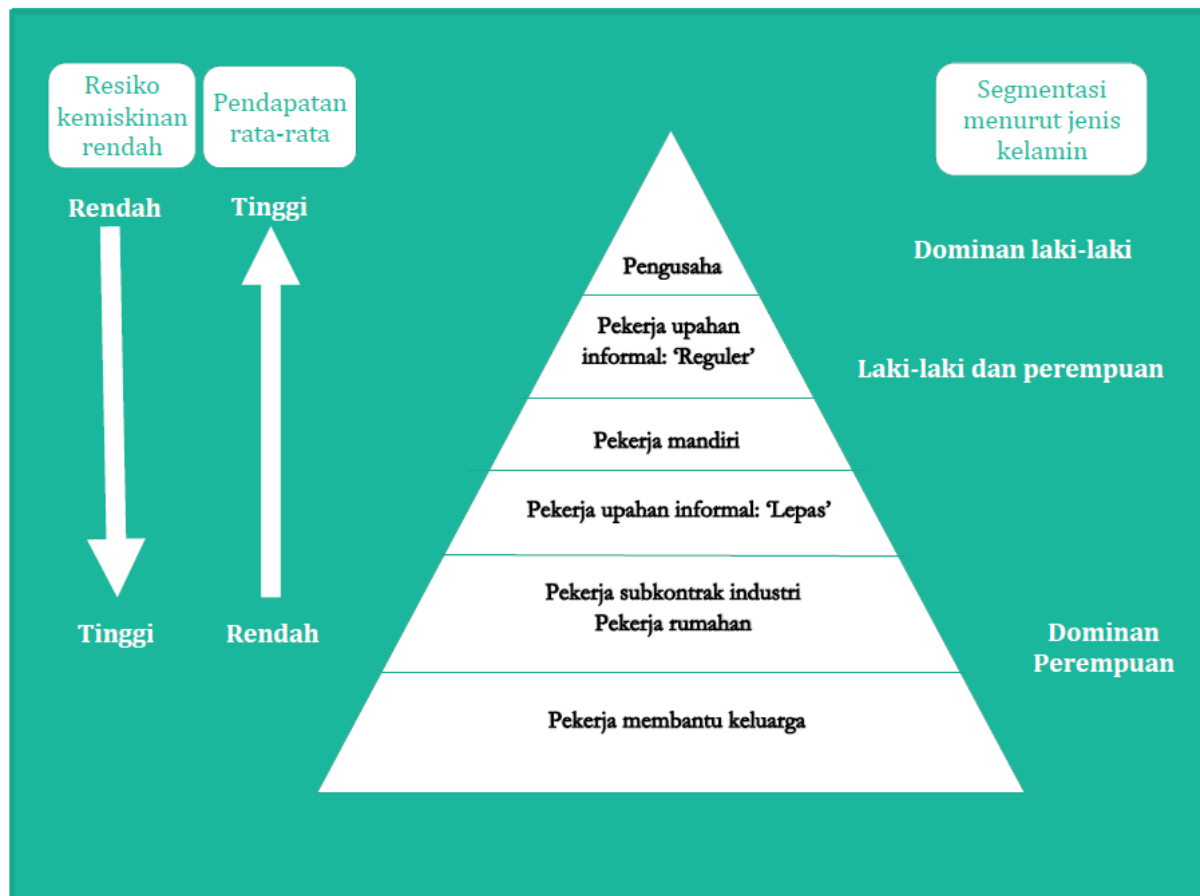
Kotak 1: Definisi dua kategori pekerja berbasis rumahan

Ada dua kategori dasar pekerja berbasis rumahan. Perbedaan ini penting dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh para pekerja ini:

- Pekerja berbasis rumahan mandiri menanggung seluruh resiko menjadi operator mandiri. Mereka membeli sendiri bahan baku, persediaan, dan peralatan, dan membayar biaya utilitas dan transportasi. Mereka menjual sendiri barang jadi mereka, utamanya ke pelanggan dan pasar lokal tetapi kadang-kadang ke pasar internasional. Sebagian besar tidak mempekerjakan orang lain tetapi mungkin memiliki anggota keluarga tidak dibayar bekerja dengan mereka.
- Pekerja berbasis rumahan sub-kontrak (disebut pekerja rumahan) dikontrak oleh pengusaha perorangan atau perusahaan, seringkali melalui perantara. Mereka biasanya diberi bahan baku dan dibayar per satuan. Mereka biasanya tidak menjual barang jadi. Namun, mereka sesungguhnya menanggung banyak biaya produksi: tempat kerja, peralatan, persediaan, utilitas, dan transportasi. Pekerja rumahan bukan pekerja rumah tangga yang bekerja di atau untuk rumah tangga melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan. Mereka juga berbeda dengan pekerja berbasis rumah mandiri yang bekerja di rumah secara mandiri.

Sumber: WIEGO, home-based workers, <http://wiego.org/informal-economy/occupational-groups/home-based-workers> (diakses November 2015); N. Haspels dan A. Matsuura (2015), "Home-based workers: Decent work and social protection through organization and empowerment. Experiences, good practices and lessons from home-based workers and their organizations", (ILO, Jakarta).

Kotak 2: Pekerjaan informal: Hirarkhi penghasilan dan resiko kemiskinan menurut status kerja dan jenis kelamin



Sumber: L. Lim: *Extending livelihood opportunities and social protection to empower poor urban informal workers in Asia. A multi-country study: Bangladesh, Indonesia, Nepal, Pakistan, Philippines, and Thailand*, (Oxfam for Asia Development Dialogue, Thailand, 2015).

Pada kenyataannya, pekerja rumahan dan pekerja mandiri memiliki banyak ciri yang sama, misalnya ketidakpastian kerja, pendapatan rendah, kondisi kerja dan hidup yang buruk yang seringkali di rumah di bawah standar dan kurangnya akses ke layanan dukungan publik atau swasta⁷. Kedua kelompok tersebut juga kurang memiliki suara dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan dan layanan publik yang sangat penting untuk produktivitas mereka,

⁷ N. Haspels dan A. Matsuura (2015), "Home-based workers: Decent work and social protection through organization and empowerment. Experiences, good practices and lessons from home-based workers and their organizations", (ILO, Jakarta).

misalnya kebijakan alokasi lahan dan perumahan, serta layanan infrastruktur dan transportasi dasar⁸. Namun, penelitian ini fokus pada pekerja berbasis rumahan sub-kontrak (pekerja rumahan) untuk menangani perlunya meningkatkan keterlihatan pekerja rumahan, yang seringkali dirancang dengan pekerja mandiri yang dianggap memiliki kendali dalam mengelola pekerjaan mereka, dan bertanggung jawab untuk membuat perbaikan, sementara pekerja rumahan dalam kenyataannya tidak memiliki tingkat kendali yang sama dan sangat tergantung dan rentan.

1.3 Metodologi dan sampel

Sampel penelitian ini didasarkan pada pendekatan *stratified random sampling* dan terdiri dari 3.010 pekerja rumahan di desa-desa yang dipilih secara acak di enam provinsi di Indonesia, meliputi:

- Sumatera Utara: sampel 300 pekerja rumahan.
- Jawa Barat: sampel 804 pekerja rumahan.
- Jawa Tengah: sampel 780 pekerja rumahan.
- Yogyakarta: sampel 80 pekerja rumahan.
- Jawa Timur: sampel 710 pekerja rumahan.
- Banten: sampel 336 pekerja rumahan.

Populasi survei penelitian ini mengacu pada pekerja rumahan perempuan. Sebagai langkah pertama dalam proses *sampling*, enam provinsi dipilih karena insiden tingginya angka mempekerjakan perempuan di sektor manufaktur menurut statistik resmi dari survei angkatan kerja Indonesia. Mengikuti pendekatan ini, kabupaten-kabupaten di provinsi-provinsi ini dipilih secara acak berdasarkan tingginya angka mempekerjakan perempuan di sektor manufaktur menurut data dari survei angkatan kerja bulan Agustus 2014, yang menghasilkan pemilihan 297 desa di dalam 104 kecamatan yang berada di 37 kabupaten. Rata-rata 10 pekerja rumahan diwawancarai per desa. Berdasarkan perkiraan dari survei angkatan kerja, ukuran sampel per kabupaten ditetapkan setara dengan 0,1% mempekerjakan perempuan di sektor manufaktur di kabupaten-kabupaten tersebut.

Karena survei angkatan kerja tidak memberikan informasi geografis di bawah tingkat kabupaten, kecamatan (dan desa) di dalam kabupaten-kabupaten tersebut dipilih secara acak dengan menggunakan data dari survei Badan Pusat Statistik Indonesia terhadap perusahaan besar dan menengah di sektor manufaktur. Pangkalan data untuk survei ini mencantumkan sebuah daftar berisi alamat semua perusahaan yang terdaftar secara formal di seluruh Indonesia dan informasi tentang jumlah pekerja yang mereka pekerjakan dan klasifikasinya sesuai dengan klasifikasi industri berstandar internasional.

Sampel disiapkan dengan menggunakan alamat yang dirinci di dalam survei perusahaan besar dan menengah di sektor manufaktur dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Data perusahaan dipilih menurut apakah perusahaan tersebut merupakan industri yang padat sumber daya

⁸ Ibid.

(*resource intensive*), padat karya (*labour intensive*) ataupun padat modal (*capital intensive*) di dalam sektor manufaktur, serta apakah merupakan perusahaan berukuran besar (100+ karyawan) ataupun menengah (20-99 karyawan).⁹ Kecamatan kemudian dipilih secara acak berdasarkan keberadaan perusahaan besar dalam industri yang padat sumber daya, karya dan modal dengan asumsi bahwa pekerja rumahan merupakan bagian dari rantai pasokan perusahaan-perusahaan besar di industri tersebut. Para peneliti diberi daftar perusahaan lengkap dengan alamatnya per kecamatan yang digunakan sebagai titik acuan untuk mengidentifikasi desa-desa di daerah-daerah di sekitar pabrik sampel yang akan didekati untuk mewawancarai pekerja rumahan. Setelah peneliti di desa-desa sasaran, mereka mencari pekerja rumahan menggunakan berbagai strategi. Misalnya, peneliti menghubungi pemerintah setempat, LSM yang bekerja dengan pekerja rumahan atau pekerja perekonomian informal lainnya dan para tokoh desa dan menjelaskan tentang pekerjaan rumahan, dan meminta mereka untuk memperkenalkan para warga desa yang melaksanakan pekerjaan rumahan.

Dengan mempertimbangkan bahwa jumlah pekerja rumahan di setiap desa yang diidentifikasi di dalam sampel tidak konsisten dan pekerja rumahan tidak ditemukan di setiap desa yang termasuk dalam sampel, maka jumlah pekerja rumahan yang diwawancarai per desa disesuaikan di lokasi. Jika tidak ditemukan pekerja rumahan, atau jumlah pekerja rumahan perempuan di satu desa kurang dari kuota sampel yang diperlukan, maka proses mengidentifikasi dan mewawancarai pekerja rumahan dilanjutkan di desa terdekat di dalam kecamatan yang sama. Tabel 1 merangkum deskripsi sampel menurut lokasi geografis. Perlu dicatat bahwa daerah-daerah yang dimasukkan di dalam sampel memiliki sejumlah besar perusahaan yang bekerja di sektor manufaktur. Banyak kabupaten ini juga memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi karena lebih besarnya tingkat kegiatan usahanya.

Tabel 1: Deskripsi sampel menurut geografi

Sumatera Utara	Kecamatan	Desa	Sampe l	Perko taan	Perd esaa n	Jawa Barat	Kecamatan	Desa	Sampe l	Perko taan	Perd esaa n
Deli Serdang	Percut Sei Tuan	Bandar Khalifa	26		1	Bogor Regency	Babakan Madang	Cipambuan	11	1	
		Sambirejo Timur	8		1			Kudu Manggu	9	1	
		Kenangan Baru	5		1			Sukaraja	10	1	
		Tembung	10		1		Cileungsi	Cileungsi	16	1	
	Sunggal	Purwodadi	11		1			Narogong	13	1	
		Payageli	7		1			Pasir Angin	8	1	
		Mulioirejo	3		1			Citeureup	3	1	
	Tanjung Morawa	Dalu	3		1		Citereup	Gunung Sari	3	1	
		Tanjung Morawa	10		1			Luwinutuk	3	1	
		Dagang Gelambir	7		1			Pasir Mukti	2	1	
		Tanjung Mulia	12	1				Puspanegara	15	1	
Medan	Medan Deli	Mabar Hilir	13	1				Sanja	7	1	
		Mabar	12	1				Sukahati	10	1	
		Kedai Durian	13	1				Tajur	3	1	
	Medan Johor	Pangkalan Masyur	1	1				Tarikolot	3	1	
		Titi Kuning	9	1			Gunung Putri	Bojong Nangka	8	1	
		Bogak Besar	11		1			Cicadas	13	1	
Serdang Berdagai	Teluk Mengkudu	Sialang Buah	10		1			Gunung Putri	10	1	
		Pekan Sialang Buah	9		1			Nagrag	4	1	
Pematang Siantar	Siantar Marihat	Parhorasan Nauli	13	1				Tlajung Udik	7	1	

⁹ Sebagian pekerja rumahan yang terkait dengan penelitian ini terhubung dengan usaha mikro dan kecil melalui modalitas sub-kontrak, tetapi kerangka sampel ditentukan dengan menggunakan survei Badan Pusat Statistik Indonesia tentang usaha besar dan menengah.

	Siantar	Nagori Sejahtera	10		1			Wanaherang	4	1	
	Siantar Utara	Sigulang-gulang	7	1			Klapa Nunggal	Bojong	3	1	
Binjai	Binjai Utara	Jatinegara	6		1	Kabupaten Sukabumi	Cicurug	Nanggerang	17	1	
	Binjai Selatan	Sukamaju	9		1			Tenjo Ayu	11	1	
Asahan	Tanjungbala i	Asahan Mati	5		1		Cidahu	Cidahu	15	1	
		Bagan Asahan Induk	11		1			Giri Jaya	19	1	
		Bagan Asahan Pekan	15		1			Jaya Bakti	18	1	
Tanjung Balai	Tanjung Balai Utara	Kuala Silo Bestari	30	1				Nanggerang	1	1	
Tebing Tinggi	Bajenis	Pelita	5	1		Kabupaten Bandung	Cikancung	Ciluluk	17	1	
	Tebing Tinggi Kota	Badak Bejuang	10	1				Hegarmanah	19	1	
Jawa Tengah	Kecamatan	Desa	Sampe l	Perko taan	Perd esaa n			Tanjunglaya	11	1	
Banyumas	Ajibarang	Ciberung	11	1			Dayeuh Kolot	Cangkuang Wetan	10	1	
		Karang Bawang	10		1			Citeureup	9	1	
		Pandansari	9	1				Pasawahan	32	1	
	Karang Lewas	Karang Gude Kulon	10	1			Majalaya	Balekambang	1		1
		Pasir Wetan	10	1				Biru	45		1
		Karang Klesem	6	1				Majasetra	1		1
	Purwokerto Selatan	Purwokerto Kulon	2	1				Padaulun	5		1
		Teluk	22	1				Sukamaju	5		1
Cilacap	Cilacap Selatan	Cilacap	1	1		Kabupaten Karawang	Margahayu	Sukamukti	1		1
		Tambakreja	8	1				Margahayu Selatan	4		1
		Cidadap	9		1			Margahayu Tengah	11		1
	Karang Pucung	Gunung Telu	11		1			Sayati	7		1
		Sindang Barang	10		1			Sukamenak	20	1	
	Kroya	Bajing Kulon	8	1			Klari	Duren	3	1	
		Pekuncen	10		1			Duren Kosambi	5	1	
Pucung Kidul		11		1	Duseh			3	1		
Jepara	Batealit	Pucung Lor	12	1				Gintung Kerta	15	1	
		Bantrung	13		1			Pancawati	17	1	
		Samosari	9		1			Walalah	11	1	
	Jepara	Bandengan	6	1		Teluk Jambe Timur	Sukaluyu	6	1		
		Kedungcino	16	1			Wadas	24	1		
		Krapyak	15	1			Cibuntu	15	1		
	Tahunan	Mantingan	10	1		Cibitung	Cibuntu	6	1		
		Tahunan	8	1			Wanasari	19	1		
Welahan		Karanganyar	12		1		Cikarang Selatan	Cibatu	12	1	
	Kebumen	Kendengsidialit	11		1	Cikarang Utara		Karang Asih	11	1	
		Teluk Wetan	10	1				Karang Baru	17	1	
Karanganyar		Grenggeng	11		1		Mekar Mukti	13	1		
	Kebumen	Sidomulyo	11		1		Mekarmukti	1	1		
		Bandung	11		1		Pasir Gombong	9	1		
Kebumen		Kebumen	Gemeksekti	12	1		Tambun Selatan	Jati Mulya	13	1	
	Jemur		10	1		Lambang Jaya		12	1		
	Kuwaru		11		1	Mangun Jaya		13	1		
	Kuwarasan	Lemah Duwur	11	1		Tambun	13	1			
		Pondok Gerbangsari	11		1	Andir	Ciroyom	4		1	
		Prembun	10	1			Dungus Cariang	31		1	
	Klaten	Prembun	12		1		Garuda	1		1	
		Karanganom	Kunden	12	1			Kebon Jeruk	4		1
Ngabeyan			11		1		Maleger Utara	1		1	
Klaten Tengah	Tarubasan		6	1			Bandung Kulon	Cigondewah Kaler	6		1
	Buntalan	9	1		Cigondewah Rahayu			7		1	
	Semangkak	12	1		Cijerah			11		1	
	Bugisan	12	1		Warung Muncang	17			1		
	Cucukan	5		1	Babakan Penghulu	20			1		
	Kemudo	13		1	Cisaranten Wetan	20			1		
Kudus	Dawe	Lau	10		1	D I Yogyakarta	Kecamatan	Desa	Sampe l	Perko taan	Perd esaa n
		Soco	10		1		Bantul	Piyungan	Sitimulyo	9	1
	Gebog	Karang Malang	10	1		Srimartani			11	1	
		Klumpit	10	1		Bangun Harjo		10	1		
		Kaliwungu	Padurenan	10	1			Sewon	Panggungharjo	12	1
	Banget		10	1		Timbulharjo	8		1		
Blimbing Kidul	Blimbing Kidul		10		1	Sleman	Berbah	Jogotirto	9	1	
	Kedung Dowo		10	1				Kalitiрто	5	1	
Purbalingga	Kaligondang	Brecek	10		1	Jawa Timur	Kecamatan	Tegalтирто	16	1	
		Kalikajar	10	1				Sidoarjo	Taman	Desa	Sampe l
		Penaruban	9	1		Sambibulu	10			1	
	Bojanegara	11	1		Wage	12	1				
	Padamara	Karanggambas	10		1	Kalijaten	8			1	
		Padamara	10	1		Kletek	5			1	
	Purbalingga	Purbalingga Wetan	10	1		Krembangan	15	1			

		Wirasana	10	1				Keboansikep	11	1		
Kabupaten Semarang	Bawen	Asinan	4		1		Gedangan	Punggul	10	1		
		Bawen	16			1		Waru	Wedoro	10	1	
		Doplang	10	1			Wadungasri		6	1		
	Bergas	Gondoriyo	13			1	Jabon		Berbek	4	1	
		Karangjati	9	1				Tambakrejo	10	1		
		Waringin Putih	8	1				Trompoasri	13	1		
	Pringapus	Derekan	9			1	Sidoarjo	Pangreh	7	1		
		Wonoyoso	11			1		Lemah Putro	10	1		
Banjardowo		10	1			Bluru Kidul		9	1			
Kota Semarang	Genuk	Genuksari	11	1			Tandes	Manukan Wetan	10	1		
		Karangroto	9	1				Manukan Kulon	10	1		
		Bringin	8	1				Balongsari	10	1		
	Ngaliyan	Podorejo	17			1	Tambaksari	Gading	19	1		
		Tambak aji	5	1				Rangkah	11	1		
		Semarang Utara	Bandarharjo	10	1				Sumurwelut	10	1	
			Panggung Kidul	10	1			Lakarsantri	Lidah Kulon	10	1	
	Banten	Kecamatan	Desa	Sampe l	Perko taan	Perd esaa n		Gunung Anyar	Rungkut Tengah	10	1	
Kota Tangerang	Batu Ceper	Batu Ceper	15	1			Ambulu	Gunung Anyar	10	1		
		Batu Jaya	17	1				Karanganyar	9	1		
		Batu Sari	16	1				Sabrang	14		1	
	Cikupa	Bitung Jaya	5			1	Silo	Silo	24		1	
		Bojong	2			1		Harjomulyo	3		1	
		Cibadak	7			1		Ledokombo	Sumber Lesung	9	1	
		Cikupa	1			1	Slateng		11		1	
		Pasir Gadung	5			1	Banyuwangi	Muncar				
		Pasir Jaya	5			1		Kalipuro	Kalipuro	22	1	
		Sukamulya	9			1		Gombengsari	8		1	
	Karawaci	Talagasari	16			1	Genteng	Genteng Kulon	7	1		
		Bugel	13	1				Genteng Wetan	20	1		
		Grengeng	11	1				Kembiritan	13		1	
		Margasari	12	1			Gempolkurung	10	1			
Periuk	Pabuaran	14	1			Menganti	Laban	10	1			
	Periuk	5	1				Sidomukti	18	1			
							Kawisanayar	2	1			
Kabupaten Tangerang	Cikupa	Bitung Jaya	4			1	Wringinanom	Kesamben Kulon	10	1		
		Sukamulya	1			1		Mondoluku	10		1	
		Talagasari	48			1		Soko	10	1		
	Curug	Binong	11			1	Gempol		10	1		
		Cukangngalih	10			1		Randupitu	6		1	
		Curug Kulon	15			1		Karang Rejo	14	1		
		Curug Wetan	2			1	Legok	22	1			
		Dukuh	2			1	Kejapanan	1	1			
		Kadu Sempur	13			1	Pandaan	Sebani	18		1	
		Sukabakti	14			1		Kebonwaris	7	1		
	Pasar Kemis	Gelam Jaya	13			1	Purwodadi	Sentul	2	1		
		Kotabumi	7			1	Plemahan	Mejono	14			
		Kuta Jaya	1			1	Wates	Puhjarah	3		1	
		Pangadegan	9			1		Janti	5		1	
		Pangadokan Kidul	5			1		Pare	Bendo	30	1	
		Pasar Kemis	7			1	Sumber Bendo		5		1	
		Sindang asih	1			1	Pare		8	1		
		Sindang Jaya	1			1	Tertek		1	1		
Sindang Sari	7			1	Pelem	4	1					
Suka Asih	12			1	Kota Malang	Sukun	Pisang Candi	2	1			
	Kabupaten Malang	Singosari	Tanjung Rejo	6			1					
			Bakalan Krajan	5			1					
			Cipto Mulyo	3	1							
	Kabupaten Mojokerto	Lawang	Bale Arjosari	24	1							
			Gunung Rejo	9	1							
			Candi Renggo	13	1							
	Ngoro	Ketindan	12		1							
	Trowulan	Sumber Ngepoh	6		1							
	Kembangsri	10	1									
	Ngoro	20	1									
Jatiasar	10	1										

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*). Petugas survei diberi pelatihan tentang konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan survei ini termasuk definisi pekerja rumahan dan rantai nilai. Untuk menentukan apakah orang yang diidentifikasi memang pekerja rumahan ataukah bukan, petugas survei mengajukan beberapa pertanyaan penyaringan terkait dengan pekerjaan responden untuk memverifikasi status mereka sebagai pekerja rumahan sebelum

memulai wawancara. Karena para pekerja rumahan biasanya hidup saling berdekatan, pada umumnya hanya ditemukan 2 atau 3 jenis pekerjaan rumahan di satu desa.

Sementara beberapa langkah diambil untuk meningkatkan kekokohan desain penelitian, penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan. Khususnya, tidak ada data tentang pekerja rumahan termasuk kerangka pengambilan sampel di Indonesia. Ini membatasi penggunaan *sampling* acak dalam desain penelitian, dengan lokasi yang dipilih secara acak sedangkan individu yang diwawancarai dipilih secara acak di lokasi. Selain itu, penelitian ini tidak dapat memperoleh informasi untuk menggambarkan hubungan rantai pasokan secara jelas karena tidak mungkin untuk mewawancarai para perantara dan pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja rumahan yang diwawancarai. Pekerja rumahan pada umumnya memiliki rasa takut kehilangan pekerjaan, dan mereka tidak ingin perantara atau pemberi kerja mereka mengetahui tentang partisipasi mereka dalam survei ini.

Penelitian ini pada awalnya bertujuan untuk memahami situasi pekerja rumahan penyandang disabilitas. Namun, karena kesulitan teknis untuk mengintegrasikan metodologi yang telah mapan secara internasional untuk melaksanakan survei tentang disabilitas ke dalam penelitian pemetaan ini, maka penelitian ini hanya mengidentifikasi keberadaan pekerja rumahan penyandang disabilitas dan tidak mencari informasi rinci khusus untuk pekerja rumahan penyandang disabilitas.

Instrumen utama yang digunakan untuk penelitian ini adalah kuesioner yang dikembangkan oleh proyek ILO/MAMPU, yang terdiri dari 83 pertanyaan terformulasi dalam sepuluh topik inti. 10 topik tersebut meliputi informasi geografis, informasi rumah tangga, kepemilikan rumah tangga, karakteristik pekerja rumahan, pendapatan dan pengeluaran, integrasi ke pasar ke belakang dan ke depan, alasan memasuki pekerjaan rumahan, akses sosial dan ekonomi, akses kesehatan, dan kesetaraan gender. Instrumen survei tersebut dikembangkan berdasarkan bahan-bahan yang ada termasuk model survei angkatan kerja ILO¹⁰, survei angkatan kerja Indonesia¹¹, kuesioner pedoman untuk pekerja rumahan dari survei tentang pekerja informal Asia dari Santosh Mehrotra dan Mario Biggeri¹², kuesioner untuk pekerja berbasis rumahan (2013) dan kuesioner tentang risiko dan kerentanan pekerja berbasis rumahan di Asia Selatan tahun 2014 yang dibagi oleh HomeNet Asia Selatan, dan kuesioner dari penelitian multi negara tentang kesehatan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)¹³. Diskusi kelompok terarah juga dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang

¹⁰ ILO Department of Statistics (2010), "Model labour force survey questionnaire (version. A)", (ILO, tidak dipublikasikan, Jenewa).

¹¹ BPS (2014), "Situasi angkatan kerja di Indonesia bulan Februari 2014", (BPS, Jakarta).

¹² Lampiran 2.1: Questionnaire guidelines for homeworkers (and control group), halaman 44, Asian Informal Workers: Global risks, local protection, Santosh Mehrotra and Mario Biggeri, Routledge Taylor & Francis Group London and New York (AS dan Kanada, 2007)

¹³ Claudia Garcia-Moreno, Henrica A.F.M. Jansen, Mary Ellsberg, Lori Heise, dan Charlotte Watts (2005), "WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women: Initial results on prevalence, health outcomes and women's responses", (WHO, Jenewa)

pengalaman dan persepsi pekerja rumahan. Untuk setiap provinsi yang disurvei, satu diskusi kelompok terarah dilaksanakan dengan peserta perempuan antara 10 hingga 15.

2. Kerangka regulasi di Indonesia

Menurut Konvensi ILO tentang Pekerjaan Rumahan, 1996 (No. 177), pekerjaan rumahan didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang, yang disebut sebagai pekerja rumahan, (i) di rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja, (ii) untuk mendapatkan upah, (iii) yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan”.¹⁴ Di Indonesia, pekerjaan rumahan atau pekerja rumahan tidak secara eksplisit didefinisikan di dalam regulasi ketenagakerjaan nasional maupun dalam statistik nasional dan ada pemahaman yang berbeda tentang pekerjaan rumahan di kalangan pengambil kebijakan, masyarakat umum, dan bahkan kadang-kadang di kalangan pekerja rumahan sendiri.

Sebuah kajian ILO¹⁵ terhadap undang-undang ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pekerja rumahan secara implisit dicakup oleh UU Ketenagakerjaan No. 13 (2003) berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 (2): Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- Pasal 1 (3): Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Kajian ini selanjutnya menetapkan bahwa pekerja rumahan berada dalam hubungan kerja dan pengusaha berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan UU Ketenagakerjaan No. 13 (2003) sebagai berikut:

- Pasal 1 (5): Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- Pasal 1 (6): Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- Pasal 1 (15): Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
- Pasal 51 (1): Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
- Pasal 86 (1): Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas a) keselamatan dan kesehatan kerja.

¹⁴ ILO (1996) Convention on Home Work (No. 177), Kantor Perburuhan Internasional, Jenewa.

¹⁵ M. Fajerman: *Review of the regulatory framework for homeworkers in Indonesia 2013*. (Jakarta, ILO, 2014). Fajerman, M. (2014) Review of the Regulatory Framework for Homeworkers in Indonesia, Kantor ILO tingkat Negara untuk Indonesia dan Timor-Leste, Jakarta.

- Pasal 88 (1): Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 90 (1): Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota atau upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Namun, dalam praktiknya pekerja rumahan dikecualikan dari cakupan UU Ketenagakerjaan karena tidak adanya konsensus mengenai status hukum pekerja rumahan serta pendapat umum di Indonesia bahwa UU Ketenagakerjaan hanya berlaku bagi pekerja di pekerjaan formal dan tidak untuk pekerja di perekonomian informal.

Di tingkat lokal, ada beberapa kemajuan untuk mengakui dan memperluas perlindungan hukum dan sosial pada pekerja rumahan sebagai akibat dari kerja advokasi berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi perempuan di beberapa daerah. Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan di Malang, Jawa Timur, mengeluarkan peraturan daerah tentang perempuan yang rentan pada tahun 2013 yang mengakui pekerja rumahan perempuan sebagai bagian dari kelompok perempuan yang harus memiliki akses ke upah layak, perlindungan sosial, pasar, layanan keuangan dan layanan lainnya, meskipun ada banyak tantangan dalam implementasi. Oleh karena itu, mayoritas pekerja rumahan mengalami tidak adanya atau tidak memadainya akses ke perlindungan hukum dan sosial.

3. Konteks ekonomi dan sosial

Enam provinsi yang dicakup di dalam penelitian ini memiliki populasi yang besar, dan mengisi lebih dari 50 persen dari total penduduk di Indonesia (Tabel 2). Provinsi-provinsi tersebut pada umumnya ditandai dengan kinerja ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan PDB provinsi di atas 5,4 persen dan empat provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten memiliki tingkat yang lebih tinggi dari pada rata-rata nasional (Tabel 3). Sumatera Utara dan Jawa Timur juga memiliki PDB per kapita provinsi yang lebih tinggi dari pada rata-rata nasional. Provinsi-provinsi ini memiliki struktur ekonomi yang terdiversifikasi yang meliputi manufaktur, dan perusahaan-perusahaan besar dan menengah di provinsi-provinsi ini beroperasi di berbagai industri misalnya makanan, minuman dan tembakau, pengolahan kayu, pengolahan karet, garmen, elektronik dan otomotif. Kontribusi enam provinsi ini ke PDB nasional sebesar 46,6 persen.

Meskipun kinerja ekonomi di enam provinsi ini secara umum kuat, ada 16,5 juta orang miskin di provinsi-provinsi ini, yang lebih dari separuh jumlah orang miskin di Indonesia (Tabel 2). Perkiraan garis kemiskinan untuk provinsi-provinsi dalam penelitian ini berkisar antara Rp. 256.368 dan Rp. 330.517 per bulan. Indeks GINI¹⁶ provinsi-provinsi yang tercakup dalam penelitian ini berkisar antara 0,35 di Sumatera Utara dan 0,44 di Yogyakarta. Ini menunjukkan

¹⁶ Indeks Gini merangkum tingkat ketimpangan dalam nilai, dengan nol mengacu pada kesetaraan sempurna dan satu mengacu ketimpangan sempurna.

bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak selalu terdistribusikan untuk membantu mengurangi kemiskinan.

Tabel 2: Indikator penduduk, kemiskinan dan ketidaksetaraan, 2013

Provinsi	Penduduk, juta (2013)	Jumlah orang miskin (juta)	Indeks GINI	Garis kemiskinan Rp. Per bulan (Perkotaan)	Garis kemiskinan Rp. Per bulan (Perdesaan)
Sumatera Utara	13,6	1,3	0,35	330.517	292.186
Jawa Barat	45,3	4,4	0,41	281.189	268.251
Jawa Tengah	33,3	4,7	0,39	268.397	256.368
D.I. Yogyakarta	4,0	0,5	0,44	317.925	275.786
Jawa Timur	38,4	4,9	0,36	278.563	269.294
Banten	11,5	0,7	0,40	300.109	264.294
Nasional	248,8	28,6	0,41	308.826	275.779

Sumber: BPS (2014) Tren indikator-indikator sosio-ekonomi pilihan, Agustus 2014, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Tabel 3: Indikator kunci PDB regional, 2013

Provinsi	Bruto Regional Produk Domestik di Harga Pasar Konstan 2000 (triliun)	Bruto Regional Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik di Harga Pasar Konstan 2000	Bruto Regional Per Kapita Produk Domestik tanpa Minyak dan Gas di Harga Pasar Konstan 2000 (juta)	Sebaran Persentase Bruto Regional Produk Domestik di Harga Pasar Terkini
Sumatera Utara	142.5	6.0%	10.4	5.3%
Jawa Barat	386.8	6.1%	8.4	14.1%
Jawa Tengah	223.1	5.8%	6.4	8.2%
D.I. Yogyakarta	24.6	5.4%	6.8	0.8%
Jawa Timur	419.4	6.5%	10.9	15.0%
Banten	105.9	5.9%	9.2	3.2%
Nasional	2661.1	5.9%	10.1	100%

Sumber: BPS (2013) GDP Regional, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Dalam hal informasi pasar kerja, tren di provinsi-provinsi yang tercakup dalam penelitian ini pada umumnya serupa dengan kondisi rata-rata nasional. Misalnya, partisipasi angkatan kerja perempuan secara umum rendah berkisar dari 42,3 persen di Jawa Barat hingga 61,6 persen di Yogyakarta berbanding dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki yang berkisar dari 80,9 persen di Yogyakarta hingga 83,8 persen di Jawa Timur (Tabel 4). Tingkat ketidakaktifan di seluruh provinsi adalah tinggi di kalangan perempuan utamanya disebabkan oleh tanggung

jawab kerumahtanggaan, dan rata-rata 48,5 persen di antara 6 provinsi tersebut. Tingkat ini tertinggi di Jawa Barat (57,7 persen). Ini menunjukkan bahwa perawatan rumah merupakan faktor signifikan yang membatasi partisipasi angkatan kerja perempuan, dan kebutuhan untuk menghasilkan pendapatan tambahan untuk rumah tangga, terutama di kalangan perempuan yang berkesukut dengan kegiatan rumah tangga penuh waktu, cenderung mempengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja berbasis rumahan.

Tabel 4: Indikator kunci pasar kerja

Indikator pasar kerja	Sumatera Utara			Jawa Barat		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Penduduk berusia 15 tahun ke atas	4.611.630	4.739.411	9.351.041	16.906.222	16.559.154	33.465.346
Aktif secara ekonomi	3.838.460	2.433.623	6.272.083	14.000.986	7.005.153	21.006.139
- Bekerja	3.630.703	2.250.668	5.881.371	12.871.114	6.359.829	19.230.943
- Menganggur	207.757	182.955	390.712	1.129.872	645.324	1.775.196
Tidak aktif secara ekonomi	773.170	2.305.788	3.078.958	2.905.236	9.553.971	12.459.207
- Bersekolah	465.283	514.289	979.572	1.511.737	1.441.402	2.953.139
- Merawat rumah	54.996	1.649.949	1.704.945	284.782	7.543.525	7.828.307
- Lainnya	252.891	141.550	394.441	1.108.717	569.004	1.677.761
Tingkat partisipasi angkatan kerja	83.23%	51.35%	67.07%	82.82%	42.3%	62.77%
Tingkat pengangguran	5.41%	7.52%	6.23%	8.07 %	9.21%	8.45%
Tingkat ketidaktifan	16.77%	48.65%	32.93%	17.18%	57.7%	37.23%
Indikator pasar kerja	Jawa Tengah			D I Yogyakarta		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Penduduk berusia 15 tahun ke atas	12.348.319	12.833.648	25.181.967	1.392.750	1.455.004	2.847.754
Aktif secara ekonomi	10.240.302	7.306.724	17.547.026	1.127.120	896.341	2.023.461
- Bekerja	9.671.796	6.878.886	16.550.682	1.083.433	872.610	1.956.043
- Menganggur	568.506	427.838	996.344	43.687	23.731	67.418
Tidak aktif secara ekonomi	2.108.017	5.526.924	7.634.941	265.630	558.663	824.293
- Bersekolah	1.000.617	948.636	1.949.253	138.857	131.688	270.545
- Merawat rumah	316.204	4.044.925	4.361.129	61.797	377.725	439.522
- Lainnya	791.196	533.363	1.324.559	64.976	49.250	114.226
Tingkat partisipasi angkatan kerja	82,93%	56,93%	69,68%	80,93%	61,60%	71,05%
Tingkat pengangguran	5,55%	5,86%	5,68%	3,88%	2,65%	3,33%
Tingkat ketidaktifan	17,1%	43,1%	30,32%	19,07%	38,40%	28,95%
Indikator pasar kerja	Jawa Timur			Banten		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Penduduk berusia 15 tahun ke atas	14.435.358	15.143.324	29.578.682	4.258.134	4.103.471	8.361.605
Aktif secara ekonomi	12.098.291	8.051.707	20.149.998	3.546.825	1.791.220	5.338.045
- Bekerja	11.577.438	7.729.070	19.306.508	3.226.730	1.627.262	4.853.992
- Menganggur	520.853	322.637	843.490	320.095	163.958	484.053
Tidak aktif secara ekonomi	2.337.067	7.091.617	9.428.684	711.309	2.312.251	3.023.560
- Bersekolah	1.177.453	1.140.685	2.318.138	382.861	347.597	730.458
- Merawat rumah	328.771	5.396.341	5.725.112	71.037	1.823.192	1.894.230

- Lainnya	830.843	554.591	1.385.434	257.411	141.461	398.872
Tingkat partisipasi angkatan kerja	83,81%	53,17%	68,12%	83,30%	43,65%	63,84%
Tingkat pengangguran	4,31%	4,01%	4,19%	9,02%	9,15%	9,07%
Tingkat ketidaktifan	16,19%	46,83%	31,88%	16,70%	56,35%	36,16%

Sumber: BPS (Agustus 2014) Situasi Angkatan Kerja di Indonesia, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

4. Karakteristik pekerja rumahan perempuan dalam sampel

Bab ini menyajikan karakteristik pekerja rumahan perempuan meliputi informasi tentang tingkat pendidikan, persepsi jender serta informasi rumah tangga mereka misalnya status perkawinan dan disabilitas.

Tingkat pendidikan

Tabel 5 di bawah menyajikan informasi tentang tingkat pendidikan pekerja rumahan. Sekurang-kurangnya lebih dari seperempat perempuan yang diwawancarai berpendidikan sekolah dasar (SD) di semua provinsi sasaran dan seperempat lainnya berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Mereka yang tidak bersekolah atau tidak lulus SD adalah di bawah 15 persen, berkisar dari 7,6 persen di Yogyakarta hingga 14,7 persen di Sumatera Utara. Sumatera Utara dan Yogyakarta memiliki jumlah lebih tinggi perempuan berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) (umum dan kejuruan) (masing-masing 33,4 persen dan 38,8 persen), mereka yang lulus SLTA (umum dan kejuruan) adalah di bawah seperempat di Jawa Barat (16,5 persen), Jawa Tengah (16,3 persen), Jawa Timur (21,9 persen) dan Banten (23,9 persen). Dibandingkan dengan rata-rata provinsi, pekerja rumahan perempuan pada umumnya memiliki tingkat pendidikan lebih rendah.

Tabel 5: Tingkat pendidikan pekerja rumahan berbanding dengan rata-rata provinsi (persen)

Tingkat pendidikan	Sumatera Utara		Jawa Barat		Jawa Tengah		D.I. Yogyakarta		Jawa Timur		Banten	
	Rata-rata sampel	Rata-rata BPS	Rata-rata sampel	Rata-rata BPS	Rata-rata sampel	Rata-rata BPS	Rata-rata sampel	Rata-rata BPS	Rata-rata sampel	Rata-rata BPS	Rata-rata sampel	Rata-rata BPS
Tidak bersekolah	1,00	0,4	5,8	2,4	3,2	6,7	1,3	1,6	4,1	7	3,3	2,8
Tidak lulus sekolah dasar	13,7	5,6	6,2	10,9	9,4	15,1	6,3	5,4	9,2	15	7,4	11,7
Sekolah dasar	27,0	18,4	33,6	34,2	39,4	30,6	26,3	12,2	36,5	30	27,4	22,4
Sekolah lanjutan tingkat pertama	24,0	20,3	36,9	17,5	31,0	22,9	26,3	17,4	27,3	17	37,8	18,8
Sekolah lanjutan tingkat atas (umum)	27,7	25,1	14,1	16,0	10,8	11,2	22,5	18,3	13,7	14	18,8	19,4
Sekolah lanjutan tingkat atas (kejuruan)	5,7	14,4	2,4	9,9	5,5	8,0	16,3	20,5	8,2	10	5,1	12,7
Diploma I/II/III/Akademi	1,0	3,5	0,7	2,8	0,5	1,8	1,3	6,4	0,9	2	0,0	3,7

Universitas	0,0	12,4	0,2	6,4	0,3	3,7	0,3	18,2	0,1	6	0,3	8,5
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Data survei; BPS (2014) Situasi Angkatan Kerja di Indonesia, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Informasi rumah tangga

Tabel 6 di bawah ini menyajikan status perkawinan dan informasi usia responden. Sebagian besar pekerja rumahan perempuan, lebih dari 80 persen, menikah. Sementara angka perempuan sebagai kepala rumah tangga pada umumnya di bawah 10 persen di provinsi-provinsi yang disurvei, angka ini lebih tinggi di Jawa Tengah (31,6 persen). Usia rata-rata perempuan yang diwawancarai adalah 40. Namun, usia responden bervariasi secara luas dengan yang termuda adalah 13 di Jawa Barat dan yang tertua adalah 83 di Jawa Timur yang menunjukkan perempuan dengan semua kelompok umur terlibat dalam pekerjaan rumahan.

Tabel 6: Karakteristik sampel kunci

Variabel	Sumatera Utara		Jawa Barat		Jawa Tengah		D.I. Yogyakarta		Jawa Timur		Banten	
	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%
Laki-laki	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Perempuan	300	100,0	804	100,0	780	100,0	80	100,0	710	100,0	336	100,0
Rumah tangga dikepalai oleh perempuan	21	7,0	54	6,7	55	31,6	10	12,5	52	7,3	6	7,8
Status perkawinan - lajang	13	4,3	49	6,1	41	5,3	3	3,8	29	4,1	21	6,3
Status perkawinan - menikah	261	87,0	677	84,2	685	87,8	71	88,8	596	83,9	305	90,8
Status perkawinan - cerai hidup	7	2,3	23	2,9	13	1,7	3	3,8	24	3,4	3	0,9
Status perkawinan - cerai mati	19	6,3	55	6,8	41	5,3	3	3,8	61	8,6	7	2,1
Penyandang disabilitas	4	1,3	7	0,9	10	1,3	0	0,0	4	0,5	3	0,9
Usia	Termuda	Tertua	Termuda	Tertua	Termuda	Tertua	Termuda	Tertua	Termuda	Tertua	Termuda	Tertua
Termuda dan tertua	13	74	13	80	15	76	15	76	19	83	-	-
Usia rata-rata	40		38		40		40		40		-	

Sumber: Data survei.

Ukuran rata-rata rumah tangga pekerja rumahan adalah antara 4 dan 5 orang yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional dan provinsi sebagaimana ditunjukkan di Tabel 7. Suami para pekerja rumahan biasanya ditemukan bekerja di bidang pekerjaan berketerampilan rendah dan tidak berketerampilan dengan pengaturan kontrak yang

rawan.¹⁷ Misalnya, penelitian ini menemukan bahwa pasangan pekerja rumahan secara dominan bekerja sebagai pekerja produksi, pekerja jasa berketerampilan rendah atau sebagai buruh tani. Selain itu, pasangan pekerja rumahan cenderung bekerja sebagai pekerja lepas bukan di pertanian atau sebagai karyawan dengan kontrak jangka pendek. Data ini menunjukkan bahwa meskipun suami mereka memperoleh penghasilan, penghasilan tersebut mungkin tidak cukup atau tidak stabil, karena lebih dari 75 persen pasangan pekerja rumahan bekerja sebagai pekerja lepas bukan di pertanian dan sebagai karyawan dengan kontrak jangka pendek, yang kemungkinan besar tanpa akses ke perlindungan sosial. Perkawinan pertama para perempuan di provinsi-provinsi yang tercakup di dalam penelitian ini cenderung dalam rentang usia 16 hingga 18 tahun atau 19 hingga 24 tahun.

Tabel 7: Rata-rata ukuran rumah tangga dan usia perkawinan

Provinsi	Penduduk, juta (2013)	Rata-rata ukuran rumah tangga (2013)	Usia perkawinan pertama perempuan % (2012)			
			10-15	16-18	19-24	25+
Sumatera Utara	13,6	4,3	3,2	20,7	56,4	19,6
Jawa Barat	45,3	3,7	15,7	36,4	38,3	9,6
Jawa Tengah	33,3	3,7	11,5	34,8	42,3	11,3
D.I. Yogyakarta	4,0	3,3	3,8	22,4	53,8	20,0
Jawa Timur	38,4	3,6	15,0	36,7	39,1	9,2
Banten	11,5	4,1	13,8	33,2	41,2	11,4
Nasional	248,8	3,9	11,1	32,1	44,0	12,8

Sumber: BPS (2014) Tren indikator-indikator sosio-ekonomi pilihan, Agustus 2014, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Sikap terhadap kesetaraan gender

Kesadaran akan kesetaraan gender mungkin bisa menjadi kunci untuk meningkatkan mata pencaharian dan kondisi kerja pekerja rumahan, karena mereka sendiri perlu menghargai dan mengakui kontribusi mereka terhadap keluarga dan masyarakat dan mulai membuat keputusan dan bertindak misalnya pengorganisasian dan perundingan bersama dengan memobilisasi pemahaman dan dukungan dari anggota keluarga mereka termasuk suami dan keluarga suami mereka. Penelitian ini berusaha memahami sikap pekerja rumahan terhadap kesetaraan gender.

Tabel 8 menyajikan data tentang sikap pekerja rumahan secara umum tentang peran perempuan di dalam rumah tangga dan kadar emansipasi mereka dari suami mereka. Tujuh dari sepuluh responden setuju dengan pernyataan bahwa istri yang baik harus mematuhi suaminya sekalipun bila dia tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa mayoritas pekerja rumahan perempuan memiliki kecenderungan untuk tetap diam dan mengikuti apa yang suami mereka katakan, sekalipun bila itu bertentangan dengan keinginan mereka sendiri. Rata-rata, 40 persen responden setuju bahwa semua keputusan penting dalam keluarga harus diambil oleh suami, yang menunjukkan bahwa persepsi mereka tentang pengambilan keputusan tidak

¹⁷ Ketenagakerjaan rawan mengacu pada penduduk bekerja yang kontrak kerjanya, baik lisan ataupun tertulis, berdurasi relatif pendek atau yang kontraknya dapat diputus dengan pemberitahuan pendek. Lihat ILO (2012) Indikator-indikator Kerja Layak: konsep dan definisi, Kantor Perburuhan Internasional, Jenewa.

sama antara perempuan dan laki-laki. Namun, mayoritas pekerja rumahan setuju bahwa istri memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, sekalipun berbeda dengan suami.

Persepsi tentang tugas-tugas rumah tangga sedikit lebih menyetujui tanggung jawab bersama, namun ini mungkin lebih sebagai sebuah aspirasi alih-alih sebagai kenyataan. Yang positif, mayoritas responden cenderung melihat pendidikan anak laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama penting, meskipun hampir seperempat perempuan di Jawa Barat setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa investasi untuk anak laki-laki bersekolah itu lebih penting dari pada investasi untuk anak perempuan bersekolah. Data ini memberitahu kita bahwa suami pekerja rumahan cenderung memiliki kewenangan yang lebih besar di dalam rumah tangga.

Tabel 8: Sikap terhadap kesetaraan gender (%)

Sumatera Utara	Setuju	Tidak setuju	Tidak tahu
Istri yang baik harus mematuhi suaminya sekalipun bila dia tidak setuju	62,0	33,7	4,3
Seluruh keputusan penting di keluarga harus diambil oleh suami	44,5	50,8	4,7
Bila istri pergi bekerja, suami harus membantu merawat rumah	75,0	20,0	5,0
Istri memiliki hak menyampaikan pendapatnya sekalipun berbeda dengan suami	92,0	3,3	4,7
Investasi untuk anak laki-laki bersekolah itu lebih penting dari pada investasi untuk anak perempuan bersekolah	9,3	87,7	3,0
Jawa Barat	Setuju	Tidak setuju	Tidak tahu
Istri yang baik harus mematuhi suaminya sekalipun bila dia tidak setuju	66,2	26,4	7,5
Seluruh keputusan penting di keluarga harus diambil oleh suami	42,4	51,2	6,3
Bila istri pergi bekerja, suami harus membantu merawat rumah	77,7	14,4	7,8
Istri memiliki hak menyampaikan pendapatnya sekalipun berbeda dengan suami	81,8	8,8	9,3
Investasi untuk anak laki-laki bersekolah itu lebih penting dari pada investasi untuk anak perempuan bersekolah	24,0	66,7	10,3
Jawa Tengah	Setuju	Tidak setuju	Tidak tahu
Istri yang baik harus mematuhi suaminya sekalipun bila dia tidak setuju	73,7	24,9	1,4
Seluruh keputusan penting di keluarga harus diambil oleh suami	47,6	51,2	1,3
Bila istri pergi bekerja, suami harus membantu merawat rumah	74,2	24,4	1,4
Istri memiliki hak menyampaikan pendapatnya sekalipun berbeda dengan suami	90,5	8,5	1,0
Investasi untuk anak laki-laki bersekolah itu lebih penting dari pada investasi untuk anak perempuan bersekolah	8,8	89,9	1,3
DIY	Setuju	Tidak setuju	Tidak tahu
Istri yang baik harus mematuhi suaminya sekalipun bila dia tidak setuju	73,8	26,3	0,0
Seluruh keputusan penting di keluarga harus diambil oleh suami	30,0	70,0	0,0
Bila istri pergi bekerja, suami harus membantu merawat rumah	85,0	15,0	0,0
Istri memiliki hak menyampaikan pendapatnya sekalipun berbeda dengan suami	96,3	3,8	0,0

Investasi untuk anak laki-laki bersekolah itu lebih penting dari pada investasi untuk anak perempuan bersekolah	10,0	88,8	1,3
Jawa Timur	Setuju	Tidak setuju	Tidak tahu
Istri yang baik harus mematuhi suaminya sekalipun bila dia tidak setuju	64,1	33,8	2,1
Seluruh keputusan penting di keluarga harus diambil oleh suami	36,9	62,0	1,1
Bila istri pergi bekerja, suami harus membantu merawat rumah	72,7	19,7	7,6
Istri memiliki hak menyampaikan pendapatnya sekalipun berbeda dengan suami	86,3	9,0	4,6
Investasi untuk anak laki-laki bersekolah itu lebih penting dari pada investasi untuk anak perempuan bersekolah	13,2	84,8	2,0
Banten	Setuju	Tidak setuju	Tidak tahu
Istri yang baik harus mematuhi suaminya sekalipun bila dia tidak setuju	79,2	16,1	4,8
Seluruh keputusan penting di keluarga harus diambil oleh suami	45,5	52,1	2,4
Bila istri pergi bekerja, suami harus membantu merawat rumah	64,3	28,3	7,4
Istri memiliki hak menyampaikan pendapatnya sekalipun berbeda dengan suami	83,0	12,5	4,5
Investasi untuk anak laki-laki bersekolah itu lebih penting dari pada investasi untuk anak perempuan bersekolah	7,4	87,8	4,8

Sumber: Data survei.

Hubungan antara pekerja rumahan dan suami mereka mungkin berdampak pada pilihan kerja serta kondisi kerja pekerja rumahan. kadar kemandirian dan sejauh mana istri didukung oleh suami mereka memainkan peran penting di sini. Secara umum, sebagian besar pekerja rumahan melaporkan bahwa hubungan mereka dengan suami mereka baik dan bahwa itu memungkinkan mereka mandiri. Pekerja rumahan jarang menolak pekerjaan karena suami mereka tidak menginginkan mereka bekerja. Sebagai ilustrasi, kurang dari 15 persen perempuan yang diwawancarai menunjukkan bahwa mereka menolak bekerja karena suami mereka tidak menginginkan mereka bekerja. Namun, banyak pekerja rumahan menyebutkan bahwa bila mereka melakukan kegiatan di luar rutinitas normal mereka, suami mereka bisa lebih bersikap mengawasi. Misalnya, peserta FGD di Banten menyebutkan bahwa mereka harus meminta persetujuan kepada suami mereka bila mereka melakukan tugas-tugas di luar rutinitas normal mereka dan mengabari suami mereka tentang kegiatan mereka secara berkala melalui pesan teks.¹⁸

Masuk ke pekerjaan rumahan

Masuknya perempuan ke pekerjaan rumahan memiliki berbagai pola berbeda di seluruh provinsi yang disurvei dalam penelitian ini. Misalnya, di Sumatera Utara, pekerja rumahan pada umumnya baru masuk ke pekerjaan rumahan setelah anak-anak mereka mulai bersekolah. Sementara di Jawa Timur banyak pekerja rumahan menunjukkan bahwa mereka selalu terlibat dalam pekerjaan rumahan dan bahwa itu “diwariskan” dari keluarga mereka. Di Jawa Tengah, pekerja rumahan seringkali mulai bekerja setelah menikah dan anak pertama mereka telah berusia 2 tahun.

¹⁸ Persepsi semacam ini dapat juga ditemukan di pekerja perempuan di EPZ Tanjung Priok, sebagaimana didokumentasikan oleh Aris Arif Mundayat [et al.], *Bertahan Hidup di Desa atau Tahan Hidup di Kota: Balada Buruh Perempuan*, Jakarta: Women Research Institute, 2008. hlm. 74.

Sekitar 50 persen pekerja rumahan yang diwawancarai dalam penelitian ini diperkenalkan ke dalam pekerjaan rumahan oleh tetangga mereka, yang juga seorang pekerja rumahan atau perantara. 20 persen lainnya diperkenalkan dengan pekerjaan rumahan oleh teman dan 15 persen diperkenalkan ke dalam pekerjaan rumahan oleh keluarga mereka. Kurang lazim diperkenalkan ke pekerjaan rumahan secara langsung melalui pemberi kerja atau melalui pejabat pemerintah.

Sebagian besar pekerja rumahan menunjukkan bahwa pekerjaan rumahan merupakan kegiatan perekonomian utama mereka dan sumber utama pendapatan. Ketika ditanya tentang kegiatan utama mereka selama bulan sebelumnya, mayoritas menunjukkan 'bekerja' baik pekerjaan rumahan atau jenis pekerjaan lain (88,5 persen) (Tabel 9). Hanya sebagian kecil yang menunjukkan bahwa mereka fokus pada perawatan rumah atau kegiatan-kegiatan lain sebagai kegiatan utama mereka. Kurang dari 10 responden mengidentifikasi sekolah sebagai kegiatan utama mereka.

Sementara kegiatan yang paling umum yang dikerjakan oleh pekerja rumahan adalah pekerjaan rumahan, mereka juga menunjukkan bahwa mereka melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jasa binatu, menjaga toko, mengumpulkan tanaman bumbu dan sayuran untuk dijual, jasa kebersihan, dan peternakan. Pada umumnya dianggap bahwa pekerja rumahan melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi karena kerawanan pengaturan kerja mereka atau karena rendahnya tingkat kompensasi untuk pekerjaan mereka, dan temuan menunjukkan bahwa pekerja rumahan yang tercakup dalam penelitian ini juga melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi.

Tabel 9: Kegiatan utama responden selama bulan sebelumnya

Kegiatan Utama	Sumatera Utara		Jawa Barat		Jawa Tengah		D.I. Yogyakarta		Jawa Timur		Banten	
	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%
Bekerja (termasuk pekerjaan rumahan)	294	98,0	682	84,8	738	94,6	76	95,0	664	93,5	202	60,1
Sekolah	N/A	N/A	2	0,2	2	0,3	1	1,3	3	0,4	1	0,3
Perawatan rumah	5	1,7	98	12,2	30	3,8	1	1,3	12	1,7	114	33,9
Kegiatan lain	1	0,3	22	2,7	10	1,3	2	2,5	31	4,4	19	5,7
Total	300	100	804	100	780	100	80	100	710	100	336	100

Sumber: Data survei.

Rata-rata, penelitian ini juga menemukan bahwa di dalam rumah tangga pekerja rumahan, 1 hingga 2 anggota rumah tangga berkemungkinan terlibat dalam kegiatan pekerjaan rumahan. Artinya, di rumah tangga pekerja rumahan, ada kemungkinan bahwa seseorang yang bekerja utamanya sebagai pekerja rumahan, serta satu orang lain yang membantu kegiatan pekerjaan rumahan. Pekerja rumahan kadang-kadang menerima bantuan dari anak mereka saat mengerjakan pekerjaan rumahan, dengan kurang dari 30 persen pekerja rumahan melaporkan bahwa anak-anak mereka membantu pekerjaan rumahan. Kadang-kadang suami

pekerja rumahan dapat membantu mereka menyelesaikan pesanan ketika mereka sedang berjuang untuk memenuhi tenggat waktu. Beberapa pekerja rumahan menyatakan bahwa suami mereka membantu mereka menyelesaikan pesanan kerja, terutama ketika mereka lelah.

Kotak 3: Mengapa saya memulai menjadi pekerja rumahan

Ibu Ida adalah seorang pekerja rumahan yang memotong kelebihan benang dari kaos. Dia memilih berhenti bekerja di sebuah pabrik setelah melahirkan bayinya. Dia enggan kembali bekerja di pabrik tersebut karena dia harus merawat anak-anaknya dan rumah tangganya. Dia mendapati bahwa tuntutan bekerja di pabrik tidak memungkinkan dia bekerja dan merawat rumah tangga. Namun, dia juga membutuhkan penghasilan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Oleh karena itu, pekerjaan rumahan merupakan sebuah kompromi.

Di pagi hari dari pukul 05.00 hingga 09.00 dia menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Setelah itu dia memulai pekerjaannya sebagai pekerja rumahan. Ketika melaksanakan pekerjaannya sebagai pekerja rumahan dia bisa beristirahat untuk menyusui bayinya. Jika bayinya menangis, dia berhenti bekerja sejenak untuk mengurus bayinya. Setelah bayinya tenang, dia meneruskan bekerja hingga pukul 12.00. Antara pukul 12.00 dan 14.00 dia memasak makan siang, mengurus bayinya, beribadah dan beristirahat. Pada sore hari dia mulai bekerja pukul 14.00 dan selesai pukul 18.00. Dia memasak makan malam, mengurus keluarganya dan beribadah. Setelah makan malam dia melanjutkan pekerjaannya selama kurang lebih 2 jam sambil menonton televisi.

Sumber: Diskusi kelompok terarah, Yogyakarta.

Lama bekerja sebagai pekerja rumahan

Tabel 10 di bawah ini menyajikan rata-rata lama waktu pekerja rumahan telah bekerja sebagai pekerja rumahan. Lama rata-rata adalah 5,9 tahun. Lama rata-rata ini meningkat seiring usia yang menyoroti bahwa banyak pekerja rumahan yang diwawancarai telah bekerja secara berkelanjutan. Lama rata-rata di Yogyakarta jauh lebih lama dari pada provinsi-provinsi lain dengan lama rata-rata untuk kelompok usia 50-54 dan 55-59 tercatat masing-masing 24,7 tahun dan 18,0 tahun. Di Jawa Timur, banyak dari kelompok usia lebih muda juga memiliki lama lagi rata-rata lebih panjang dibandingkan provinsi lain, dan lama rata-rata untuk kelompok usia 20-24 dan kelompok usia 25-29 masing-masing 6,7 tahun dan 6,9 tahun. Lama rata-rata kelompok usia di bawah 20 tahun di Sumatera Utara dan Jawa Tengah juga relatif panjang, yang menunjukkan bahwa sebagian perempuan tersebut memulai pekerja rumahan di usia muda.

Tabel 10: Jumlah tahun sebagai pekerja rumahan

Kelompok usia	Tahun					
	Sumatera Utara	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
Di bawah 20	4,0	0	4,9	0	0	0
20-24	2,6	1,5	-	1,8	6,7	1,5
25-29	3,4	2,9	-	2,2	6,9	2,9
30-34	3,4	2,9	-	2,2	5,7	2,9
35-39	5,2	3	-	4,2	8,8	3,0

40-44	5,9	3,5	-	7,2	8,0	3,5
45-49	7,3	4,6	-	11,7	6,1	4,6
50-54	8,8	5,1	-	24,7	7,2	5,1
55-59	9,0	6,5	0,0	18,0	9,3	6,5
60+	11,2	4,5	0,0	14,0	3,2	4,5
Total	5,8	3,5	-	9,6	6,9	3,5

Sumber: Data survei.

Jika diberi pilihan, 50 persen pekerja rumahan yang diwawancarai menunjukkan bahwa mereka ingin membangun usaha sendiri. Dua puluh persen menyatakan bahwa mereka akan lebih memilih menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Hanya sebagian kecil dari sampel yang tertarik untuk menjadi pekerja di perekonomian formal atau melanjutkan pendidikan mereka. Informasi yang disampaikan di dalam diskusi kelompok terarah menyoroti bahwa banyak perempuan lebih memilih tinggal di rumah untuk memenuhi tanggung jawab perawatan mereka atau memiliki pekerjaan yang memberi mereka fleksibilitas yang sama seperti yang mereka miliki sebagai pekerja rumahan.

5. Jenis pekerjaan pekerja rumahan

Pekerja rumahan pada umumnya dianggap terkonsentrasi di sektor garmen. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pekerja rumahan bukanlah kelompok yang homogen dan mereka ada di banyak pekerjaan berbeda, seperti juga terlihat melalui pelaksanaan proyek ILO/MAMPU. Ada pekerja rumahan yang bekerja di berbagai sektor dan industri melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti mengolah sayuran (misalnya bawang merah, bawang putih, dll.), makanan laut (misalnya udang, ikan), menjahit tas, melepas benang dari pakaian jadi, membuat suku cadang produk elektronik, dan memproduksi peralatan olahraga, dan bordir.

Tabel 11 di bawah ini merangkum keberadaan pekerjaan rumahan menurut sub-sektor industri untuk provinsi-provinsi yang tercakup di dalam penelitian ini. Di empat dari enam provinsi yang disurvei, lebih dari 40 persen pekerja rumahan ditemukan di sub-sektor 'manufaktur lainnya'. Di Sumatera Utara dan Yogyakarta, sebagian besar pekerja rumahan ditemukan masing-masing di sub-sektor 'pengolahan makanan' dan 'kulit, barang kulit dan alas kaki', diikuti oleh sektor 'manufaktur lainnya'. Tren konsentrasi pekerja rumahan menurut sub-sektor pada umumnya sama dengan tren konsentrasi pekerjaan menurut sub-sektor. Misalnya, di Sumatera Utara, pengolahan makanan merupakan sub-sektor pekerjaan paling umum di bidang manufaktur.

Tabel 11: Pekerjaan menurut sub-sektor industri untuk pekerja rumahan

Sub-Sektor	Sumatera Utara		Jawa Barat		Jawa Tengah		D.I. Yogyakarta		Jawa Timur		Banten	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Pengolahan makanan	144	48,0	116	14,5	95	12,2	11	13,8	85	12,0	38	11,3
Pengolahan minuman	10	3,3	2	0,2	N/A	N/A	N/A	N/A	4	0,6	1	0,3
Pengolahan tembakau	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0,1	N/A	N/A	1	0,1	N/A	N/A

Tekstil (pemintalan, tenun, pencelupan)	13	0,3	13	1,6	63	8,1	11	13,8	57	8,0	24	7,1
Pakaian jadi (menjahit baju)	29	9,7	232	28,9	126	16,2	13	16,3	62	8,7	50	14,9
Kulit, barang kulit dan alas kaki	13	4,3	36	4,5	70	9,0	29	36,3	44	6,2	60	17,9
Pengolahan kayu, bambu dan rotan	12	4,0	23	2,9	98	12,6	2	2,5	122	17,2	13	3,9
Furnitur	N/A	N/A	15	1,9	9	1,2	1	1,3	41	5,8	4	1,2
Manufaktur lain	79	26,3	367	45,6	318	40,8	13	16,3	294	41,4	146	43,5
Total	300	100	804	100	780	100	80	100	710	100	336	100

Sumber: Data survei.

Ketika melihat keseluruhan keberadaan pekerjaan rumahan di dalam klasifikasi industri¹⁹, 42,7 persen pekerja rumahan berada di industri manufaktur padat karya yang meliputi manufaktur tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kayu dan produk kayu, dan furnitur. Hanya 16,9 persen pekerja rumahan berada di industri padat sumber daya yang meliputi pengolahan makanan, minuman, tembakau dan kertas, serta kimia, minyak bumi, farmasi dan karet, meskipun hampir separuh pekerja rumahan di Sumatera Utara berada di industri padat sumber daya. Selanjutnya, tidak ada pekerja rumahan yang diwawancarai melaporkan bekerja di sub-sektor manufaktur kimia, minyak bumi, obat-obatan atau karet. Bagian sampel lainnya (40,4 persen) berada di industri padat modal yang meliputi logam, elektronik, mesin dan manufaktur otomotif. Contoh kegiatan per kelompok ditunjukkan di Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12: Contoh kegiatan per klasifikasi industri

Klasifikasi industri	Padat karya	Padat sumber daya	Padat modal
Contoh kegiatan	• mengencangkan jepitan bra. • mengemas mainan. • menjahit sepatu. • menjahit bantalan helm. • membuat bunga dari pita.	• mengupas sayuran. • membuat makanan ringan. • mengemas item-item makanan lain.	• menggulung kawat elektronik dan meletakkannya di dalam kemasan. • memoles dan menempelkan label pada perkakas. • mengencangkan tutup atas aki mobil. • menggulung tempat kartu telepon seluler. • memasang saklar listrik.

Sumber: Data survei.

Sementara pekerja rumahan semuanya terlibat dalam produksi, pekerja rumahan dengan keterampilan khusus misalnya pekerja kerajinan pada umumnya memiliki posisi tawar yang

¹⁹ Aswicahyono, Hill dan Narjoko menjelaskan manufaktur padat karya mencakup manufaktur tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kayu dan produk kayu dan furnitur, dan industri padat sumber daya mencakup pengolahan makanan, minuman, tembakau dan kertas serta bahan kimia, minyak bumi, farmasi dan karet, dan industri padat modal mencakup manufaktur elektronik, mesin dan otomotif.

lebih kuat karena pemberi kerja, sub-kontraktor atau perantara mungkin tidak dapat dengan mudah menemukan pekerja pengganti yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memproduksi untuk mereka, sementara pekerja produksi berketerampilan rendah dapat digantikan dengan mudah. Para pekerja rumahan juga diwawancarai tentang pekerjaan mereka untuk memahami porsi pekerja rumahan sebagai pekerja kerajinan. Menurut Tabel 13 di bawah ini, porsi pekerja rumahan yang bekerja sebagai pekerja kerajinan adalah kecil di seluruh provinsi sedangkan porsi pekerja kerajinan di Yogyakarta relatif lebih tinggi (28,8 persen). Di Sumatera Utara, hanya 6,3 persen pekerja rumahan bekerja sebagai pekerja kerajinan.

Tabel 13: Pekerjaan pekerja rumahan

Pekerjaan	Sumatera Utara		Jawa Barat		Jawa Tengah		D.I. Yogyakarta		Jawa Timur		Banten	
	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%
Pekerja kerajinan	19	6,3	141	17,5	87	11,2	23	28,8	145	20,4	30	8,9
Pekerja produksi tekstil, garmen dan kulit	50	16,7	284	35,3	221	28,3	37	46,3	119	16,8	134	39,9
Pekerja produksi makanan dan minuman	149	49,7	118	14,7	96	12,3	11	13,8	81	11,4	39	11,6
Pekerja produksi kayu, rotan dan bambu	12	4,0	15	1,9	80	10,3	N/A	N/A	68	9,6	13	3,9
Pekerja produksi lainnya	59	19,7	243	30,2	251	32,2	9	11,3	278	39,2	119	35,4
Tidak tahu	11	3,7	3	0,4	45	5,8	N/A	N/A	19	2,7	1	0,3
Total	300	100	804	100	780	100	80	100	710	100	336	100

Sumber: Data survei.

6. Pengaturan kerja pekerja rumahan

6.1 Perjanjian kerja

Pekerja rumahan pada umumnya dikenal bekerja di bawah pengaturan informal tanpa kontrak atau perjanjian tertulis. Penelitian ini meneliti situasi pekerja rumahan di enam provinsi dan menemukan bahwa sangat jarang pekerja rumahan memiliki perjanjian tertulis. Sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 14, hanya 2 persen pekerja rumahan yang diwawancarai memiliki perjanjian tertulis dengan pemberi kerja atau perantara mereka. Proporsi pekerja yang memiliki 'perjanjian lisan' adalah 53,4 persen dan yang 'tanpa perjanjian' adalah 41,8 persen. Ada sebagian kecil pekerja rumahan yang menyatakan bahwa mereka tidak kenal dengan perjanjian kerja (2,8 persen). Bila melihat hasil menurut provinsi, Jawa Timur memiliki persentase tertinggi pekerja rumahan yang menyatakan bahwa mereka memiliki perjanjian lisan (93,5 persen). Proporsi pekerja rumahan tanpa perjanjian tertinggi di Banten (71,1 persen).

Karena UU Ketenagakerjaan No. 13 (2003) menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mengandung unsur-unsur pekerjaan, upah dan perintah kerja (Pasal 1 (15)), dan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat baik secara lisan ataupun tertulis (Pasal 51), maka dapat dikatakan bahwa lebih dari 50 persen pekerja rumahan memiliki hubungan kerja dan bahwa mereka harus dicakup oleh berbagai ketentuan misalnya pembayaran upah minimum.

Tabel 14: Jenis perjanjian pekerja rumahan

Provinsi	Perjanjian tertulis		Perjanjian lisan		Tanpa perjanjian		Tidak tahu	
	Jml. dalam sampel	% sampel	Jml. dalam sampel	% sampel	Jml. dalam sampel	% sampel	Jml. dalam sampel	% sampel
Sumatera Utara	3	1,0	135	45,0	152	50,7	10	3,3
Jawa Barat	7	0,9	476	59,2	278	34,6	43	5,3
Jawa Tengah	37	4,7	230	29,5	507	65,0	6	0,8
D.I. Yogyakarta	2	2,5	25	31,3	53	66,3	0	0
Jawa Timur	9	1,3	664	93,5	30	4,2	7	1,0
Banten	2	0,6	78	23,2	239	71,1	17	5,1
Total/average	60	2,0	1608	53,4	1259	41,8	83	2,8

Sumber: Data survei.

6.2 Tempat kerja

Analisis data menunjukkan bahwa pekerja yang diwawancarai dalam penelitian ini bekerja di dalam rumah mereka sendiri atau di rumah teman. Sebagian kecil mendeskripsikan tempat kerja mereka sebagai sebuah struktur yang melekat pada rumah mereka, misalnya halaman atau garasi. Tidak ada responden yang mengidentifikasi tempat kerja pemberi kerja mereka sebagai tempat kerja mereka. Meskipun ini memberi pekerja rumahan fleksibilitas untuk mengelola baik tanggung jawab ekonomi maupun tanggung jawab perawatan, namun ini menyoroti pentingnya mempromosikan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Tanpa perhatian dan pertimbangan yang cukup terhadap kesehatan dan keselamatan di tempat kerja yang merupakan rumah pekerja rumahan, kesehatan dan keselamatan pekerja rumahan dan anggota keluarga mereka bisa dirugikan jika peralatan atau perlengkapan tidak disimpan dengan benar atau bahan baku mengandung kandungan berbahaya. Kenyataannya, sebagian pekerja rumahan mengeluhkan bau menyengat dari bahan baku yang mereka gunakan menimbulkan masalah kesehatan untuk mereka misalnya sakit kepala.

6.3 Spesifikasi, instruksi dan pelatihan

Penelitian ini selanjutnya meneliti rincian spesifikasi. Dalam hal informasi tentang apa dan bagaimana cara memproduksi produk (desain, bahan, dll.), rata-rata, 78,1 persen pekerja rumahan melaporkan bahwa mereka mendapatkan spesifikasi dari pemberi kerja mereka (Tabel 15). Pemberian spesifikasi paling umum di Banten (91,1 persen). Persentase yang tinggi

ini mungkin menunjukkan bahwa pekerja rumahan mungkin memproduksi barang terkait dengan pasar internasional (misalnya sepatu, pakaian, dll.) dimana produknya harus lulus standar kualitas dan spesifikasi tertentu. Pemberian spesifikasi paling tidak umum di Yogyakarta.

Tabel 15: Pekerja rumahan mendapatkan spesifikasi atau instruksi

Provinsi	Mendapatkan spesifikasi dari pemberi kerja		Tidak mendapatkan spesifikasi dari pemberi kerja	
	Jumlah di sampel	% sampel	Jumlah di sampel	% sampel
Sumatera Utara	220	73,3	80	26,7
Jawa Barat	650	80,8	154	19,2
Jawa Tengah	555	71,2	225	28,8
D.I. Yogyakarta	51	63,8	29	36,3
Jawa Timur	567	79,9	143	20,1
Banten	306	91,1	30	8,9
Total	2349	78,1	661	21,9

Sumber: Data survei.

Karena pekerja rumahan memproduksi sesuai dengan spesifikasi dari pemberi kerja, penelitian ini menanyakan kepada pekerja rumahan apakah mereka mendapatkan pelatihan dari pemberi kerja mereka untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka agar dapat menyelesaikan pesanan kerja secara tepat, dan menemukan bahwa jarang pekerja rumahan mendapatkan pelatihan. Tabel 16 merangkum tren terkait dengan pekerja rumahan memperoleh pelatihan. Penelitian ini menemukan bahwa pekerja rumahan pada umumnya tidak mendapatkan pelatihan dari pemberi kerja. Ini terutama terjadi di Sumatera Utara dan hanya 17,3 persen pekerja rumahan mendapatkan pelatihan dari pemberi kerja. Ini mungkin menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja rumahan di Sumatera Utara mengerjakan tugas-tugas dasar.

Di tempat pekerja rumahan mendapatkan pelatihan, pelatihan itu sebagian besar adalah pelatihan sambil bekerja yang bersifat informal, di mana pemberi kerja mengunjungi rumah mereka dan memberikan beberapa instruksi tentang metode memproduksi produk tersebut sesuai dengan spesifikasi. Rasio pekerja rumahan yang mendapatkan pelatihan tertinggi di Banten (56,8 persen), di mana pemberian spesifikasi oleh pemberi kerja juga tertinggi.

Secara umum, ditemukan bahwa pemberi kerja memberikan instruksi untuk memproduksi barang dengan standar kualitas, alih-alih pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan pekerja rumahan. Ini menunjukkan terbatas atau tidak adanya peluang bagi pekerja rumahan untuk belajar keterampilan baru untuk meningkatkan daya kerja mereka dan banyak yang bekerja tanpa ruang lingkup untuk meningkatkan pendapatan mereka, bahkan setelah bekerja selama bertahun-tahun.

Tabel 16: Pekerja rumahan mendapatkan pelatihan

Provinsi	Mendapatkan pelatihan dari pemberi kerja		Tidak mendapatkan pelatihan dari pemberi kerja	
	Jumlah di sampel	% sampel	Jumlah di sampel	% sampel
Sumatera Utara	52	17,3	248	82,7
Jawa Barat	398	49,5	406	50,5
Jawa Tengah	305	39,1	475	60,9
D.I. Yogyakarta	20	25,0	60	75,1
Jawa Timur	210	29,6	500	70,4
Banten	191	56,8	145	43,2
Total	1175	39,0	1834	61,0

Sumber: Data survei.

6.4 Biaya produksi

Karena rumah sebagai tempat kerjanya, pekerja rumahan pada umumnya menanggung sendiri berbagai biaya produksi, termasuk penyediaan tempat kerja dan peralatan, biaya transportasi dan utilitas meliputi listrik dan air dan masukan-masukan terkait lainnya. Menurut penelitian, lebih dari 70 persen responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima kompensasi atas biaya yang terkait dengan proses produksi mereka terkait dengan pekerjaan rumahan.

Dalam hal pasokan bahan baku, pekerja rumahan pada umumnya menerima bahan baku dari pemberi kerja mereka, meskipun ada kasus di mana pekerja rumahan membeli sebagian atau seluruh bahan baku. Dalam penelitian ini, mayoritas pekerja rumahan (95,0 persen) menyatakan bahwa mereka menerima bahan baku dari pemberi kerja mereka (Tabel 17). Di enam provinsi yang disurvei, sekitar 50 persen pekerja rumahan menyatakan bahwa mereka mengambil bahan baku dari pemberi kerja atau perantara mereka sementara sebagian besar dari sisanya menyatakan bahwa bahan baku dikirimkan kepada mereka oleh pemberi kerja atau perantara mereka. Hanya sejumlah kecil pekerja rumahan yang membeli bahan baku sendiri pasar.

Tabel 17: Pekerja rumahan menerima bahan

Provinsi	Menerima bahan dari pemberi kerja		Tidak menerima bahan dari pemberi kerja	
	Jumlah di sampel	% sampel	Jumlah di sampel	% sampel
Sumatera Utara	291	97.9	9	3.0
Jawa Barat	717	89.4	87	10.8
Jawa Tengah	754	96.7	26	3.3
D.I. Yogyakarta	79	98.8	1	1.3
Jawa Timur	685	96.5	25	3.5
Banten	329	97.9	7	2.1

Total	2855	94.9	155	5.1
-------	------	------	-----	-----

Sumber: Data survei.

Tabel 18 menyajikan hasil penelitian dalam kaitannya dengan penyediaan alat. Dibandingkan dengan penyediaan bahan baku, kurang lazim pekerja rumahan mendapatkan peralatan dari pemberi kerja. Rata-rata, hampir 40 persen tidak mendapatkan peralatan yang diperlukan untuk penyelesaian produk pekerja rumahan. Terkecuali pekerja rumahan di Banten, di mana mayoritas pekerja rumahan (92,2 persen) mendapatkan peralatan dari pemberi kerja mereka yang mungkin terkait dengan fakta bahwa produk yang diproduksi di kalangan pekerja rumahan di Banten memerlukan spesifikasi lebih khusus yang diperlukan untuk memenuhi standar untuk pasar internasional. Di sisi lain, lebih dari separuh pekerja rumahan (60 persen) di Sumatera Utara tidak mendapatkan peralatan. Pekerja rumahan dalam pengolahan makanan di Sumatera Utara menunjukkan bahwa mereka biasanya menggunakan pisau, parang, gunting mereka sendiri yang dapat dengan mudah ditemukan di pasar lokal. Penjelasan lebih lanjut dari diskusi kelompok terarah menunjukkan bahwa pilihan peralatan dalam pengolahan makanan tidak terlalu berpengaruh pada kualitas produk, itulah mengapa peralatan jarang disediakan oleh pemberi kerja.

Tabel 18: Pekerja rumahan yang menerima peralatan

Provinsi	Mendapatkan peralatan dari pemberi kerja		Tidak mendapatkan peralatan dari pemberi kerja	
	Jumlah di sampel	% sampel	Jumlah di sampel	% sampel
Sumatera Utara	120	40,0	180	60,0
Jawa Barat	503	63,3	301	37,4
Jawa Tengah	455	58,3	325	41,7
D.I. Yogyakarta	35	43,8	45	56,3
Jawa Timur	389	54,8	321	45,2
Banten	309	92,0	27	8,0
Total	1811	60,4	1199	39,6

Sumber: Data survei.

Proyek ini telah mendengar pengalaman di mana pekerja rumahan harus membayar sebagai deposit untuk mulai bekerja sebagai jaminan untuk bahan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perantara. Oleh karena itu, penelitian ini juga memeriksa kejadian di mana pekerja rumahan diminta membayar deposit sebelum mulai bekerja sebagai pekerja rumahan. Kenyataannya, penelitian ini menemukan bahwa 2 persen pekerja rumahan diharuskan membayar deposit untuk bahan dan peralatan yang mereka terima. Meskipun persyaratan membayar deposit sangat sedikit terjadi di kalangan pekerja rumahan yang diwawancarai, namun penting untuk mengenali adanya praktik ini oleh pemberi kerja dan perantara karena praktik ini memberi beban lebih pada pihak pekerja rumahan untuk masuk ke dalam

pekerjaan untuk memperoleh penghasilan dan berupaya mendapatkan dan mempertahankan pendapatan yang layak.

Penelitian ini juga menemukan beban tambahan diletakkan pada pihak pekerja rumahan. Pekerja rumahan mengungkapkan bahwa mereka pada umumnya bertanggung jawab untuk bekerja lebih atas produk rusak, misalnya menambah jam kerja untuk memperbaiki produk yang rusak, sehingga produk dapat diterima oleh pemberi kerja atau perantara mereka. Karena mereka dibayar berdasarkan jumlah output yang mereka produksi, dan bukan berdasarkan jumlah jam kerja, mereka tidak diberi kompensasi untuk jam tambahan mereka bekerja memperbaiki produk yang rusak.

6.5 Hubungan ke pasar

Penelitian internasional tentang pekerja rumahan biasanya menemukan bahwa pekerja rumahan memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang pemberi kerja mereka dan pasar untuk mana mereka memproduksi,²⁰ karena pekerja rumahan sering menerima pekerjaan dari perantara yang memberikan bahan baku dan mengumpulkan produk jadi, dan perantara ini mungkin bekerja dengan sub-kontraktor yang selanjutnya memasok produk ke perusahaan yang lebih besar. Oleh karena itu, panjangnya rentang rantai pasokan merupakan salah satu faktor yang seringkali menghambat proses mengidentifikasi pemberi kerja utama yang memberikan pesanan produksi atau dari mana produk itu berasal. Namun, pengetahuan tentang pemberi kerja mereka dan pasar diperlukan jika pekerja rumahan bernegosiasi untuk memperbaiki kondisi kerja mereka.

Di enam provinsi yang disurvei, ada berbagai pola di mana pekerja rumahan merupakan bagian dari rantai pasokan. Yang paling umum adalah bahwa bila produk pekerja rumahan telah selesai, perantara mengumpulkan produk dari pekerja rumahan dan mengirimkan produk ke perusahaan lain yang mungkin bekerja dengan perusahaan nasional dan internasional. Terkecuali kasus di Jawa Barat dan Banten, di mana pekerja rumahan cenderung bekerja berkelompok dan pemimpin kelompok akan mengirimkan produk jadi ke perantara. Di Sumatera Utara perusahaan seringkali memiliki hubungan langsung dengan pekerja rumahan (tanpa perantara). Meskipun penelitian ini tidak dapat memperoleh gambaran lengkap rantai pasokan untuk melacak di mana produk yang dibuat oleh pekerja rumahan dikirim dan dijual, namun menjadi jelas dari beberapa wawancara bahwa sebagian pekerja terlibat dalam produksi barang bagi perusahaan yang terkenal secara global.

Tabel 19 menyajikan pengetahuan pekerja rumahan tentang perusahaan yang mempekerjakan mereka. Tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata, 58,1 persen responden memiliki pengetahuan tentang perusahaan yang mempekerjakan mereka atau yang memberi perintah produksi, meskipun ada variasi di enam provinsi dengan persentase tinggi pekerja rumahan mengetahui pemberi kerja di Jawa Tengah (87,6 persen), sedangkan persentase rendah di Banten sebesar 23,5 persen. Ketika ditanya nama perusahaan untuk mana mereka

²⁰ S. Mehrotra dan M. Biggeri (2007), "Asian informal workers : Global risks, local protections", (Routledge, London dan AS).

memproduksi, beberapa merek yang sangat terlihat dalam rantai pasokan global disebutkan di Jawa Tengah. Sementara pekerja rumahan yang menyebutkan ini tidak menerima pekerjaan langsung dari perusahaan-perusahaan yang diakui secara internasional ini, mereka menyadari bahwa mereka memproduksi untuk merek-merek tersebut karena nama perusahaan disebutkan di produk yang dikerjakan oleh pekerja rumahan.

Pekerja rumahan cenderung berhubungan dengan perantara ketimbang berhubungan langsung dengan pabrik atau merek (Lihat Kotak 4 untuk contoh dari Banten). Memang, sebagian besar pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja rumahan adalah usaha mikro dan kecil yang bertindak sebagai pemasok, sub-pemasok, atau perantara pabrik yang lebih besar, dan pekerja rumahan mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang pabrik dengan mana usaha mikro tersebut melakukan bisnis. Para pekerja rumahan yang tidak memiliki pengetahuan tentang perusahaan untuk mana mereka memproduksi tersebut cenderung direkrut ke dalam pekerjaan rumahan melalui keluarga atau teman-teman.

Tabel 19: Pengetahuan pekerja rumahan tentang perusahaan untuk mana mereka memproduksi

Provinsi	Perusahaan diketahui		Perusahaan tidak diketahui	
	Jumlah di sampel	% sampel	Jumlah di sampel	% sampel
Sumatera Utara	198	66,0	102	34,0
Jawa Barat	333	41,4	471	58,6
Jawa Tengah	683	87,6	97	12,4
D.I. Yogyakarta	62	77,5	18	22,5
Jawa Timur	371	52,3	339	47,7
Banten	79	23,5	257	76,5
Total	1726	58,1	1284	41,9

Sumber: Data survei.

Kotak 4: Hubungan rantai pasokan: kasus Ibu Dina, Banten

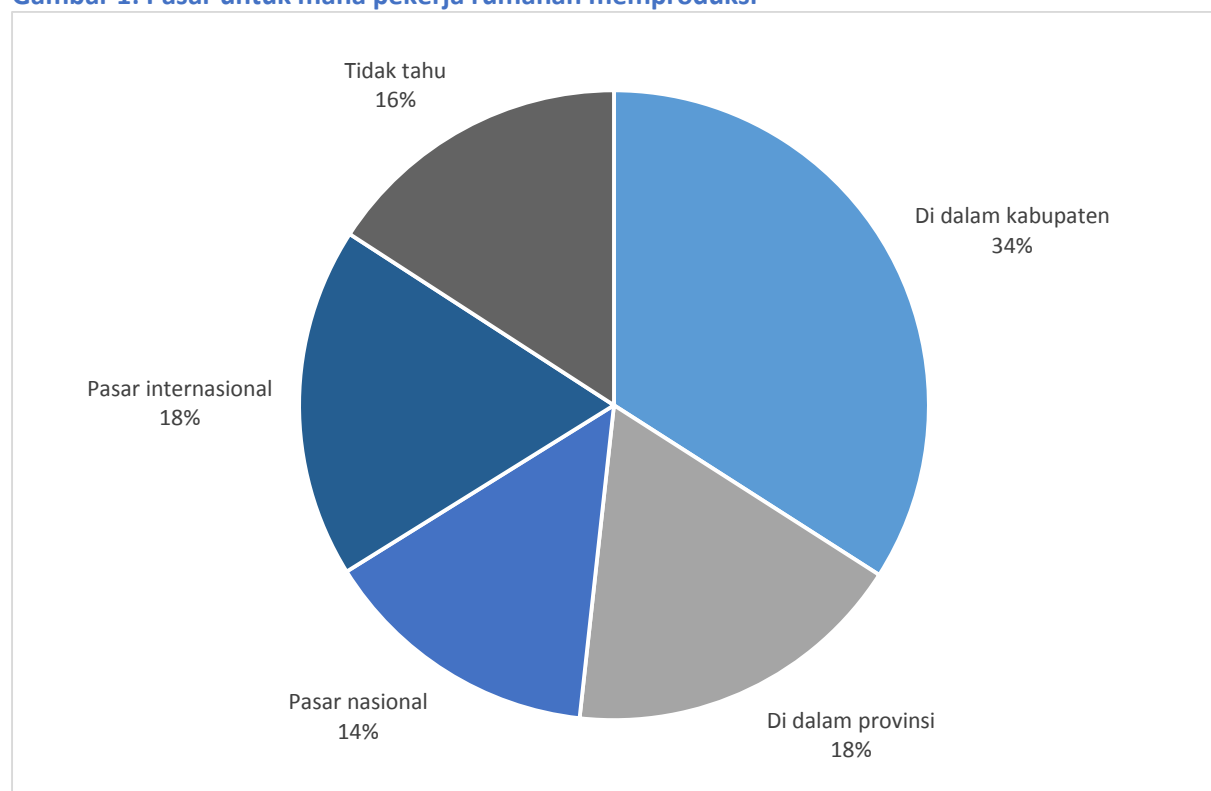
Ibu Dina bekerja di sektor pakaian jadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Baginya pekerjaan rumahan merupakan jenis pekerjaan yang fleksibel karena dia tidak diawasi secara langsung, bekerja kapanpun dia inginkan dan tidak harus mengisi daftar hadir. Dia memilih untuk terlibat dalam jenis pekerjaan ini karena dia dapat bekerja menurut keleluasaannya sendiri sembari melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak. Dia juga bisa beristirahat dengan keleluasaannya sendiri dan tidak tertekan oleh target produksi harian.

Perantara yang Ibu Dina bekerja untuknya adalah temannya yang memberinya bahan baku dan mengumpulkan produk jadi. Dia tidak tahu pabrik mana yang membeli produk jadinya atau di pasar mana produk jadinya dijual. Teman perantaranya menunjukkan bahwa pesanan kerja diberikan oleh pemilik sebuah perusahaan pakaian di kabupaten yang sama. Namun, menurut teman perantaranya, pemilik pabrik ini juga menerima bahan dari pihak lain yang asalnya dia tidak tahu.

Sumber: Diskusi kelompok terarah, Banten.

Di Indonesia, ada pemahaman yang berbeda tentang pekerjaan rumahan dan sebagian orang berpandangan bahwa produk yang diproduksi oleh pekerja rumahan adalah untuk konsumsi sendiri atau konsumsi lokal saja dan mereka tidak dianggap berkontribusi terhadap perekonomian nasional, regional dan global. Namun, ketika ditanya tentang pasar untuk produk yang diproduksi oleh pekerja rumahan, 18 persen menyatakan bahwa mereka memproduksi untuk pasar internasional, dan 14 persen menyatakan mereka memproduksi untuk pasar nasional (Gambar 1). Penelitian ini menegaskan bahwa rantai pasokan global terkait dengan pekerja rumahan di Indonesia melalui pengaturan sub-kontrak berlapis-lapis. Karena pekerja rumahan pada umumnya memiliki informasi yang terbatas, juga mungkin bahwa lebih banyak produk dijual di pasar internasional dan nasional dari pada yang diklaim oleh pekerja rumahan dalam penelitian ini. Sebagian kecil pekerja rumahan (16 persen) menyatakan bahwa mereka tidak tahu di mana produk mereka dijual.

Gambar 1: Pasar untuk mana pekerja rumahan memproduksi



Sumber: Data survei.

7. Kondisi kerja pekerja rumahan

7.1 Waktu kerja

Menurut sebuah penelitian skala kecil yang dilakukan oleh proyek ILO/MAMPU pada tahun 2013, pekerja rumahan pada umumnya bekerja dengan jam kerja panjang dan memiliki volume produk yang besar untuk diselesaikan dalam waktu singkat.²¹ Untuk memberikan wawasan lebih lanjut tentang situasi ini, sub-bab ini menyajikan data tentang rata-rata jam kerja pekerja rumahan.

Tabel 20 di bawah ini menunjukkan variasi rata-rata waktu kerja untuk pekerja rumahan di 6 provinsi. Di seluruh enam provinsi tersebut, rata-rata, 45,6 persen pekerja rumahan bekerja paruh waktu (kurang dari 35 jam per minggu) dan 32,6 persen pekerja rumahan bekerja dengan jam kerja berlebihan (48 jam atau lebih). Porsi pekerja rumahan yang bekerja dengan jam kerja berlebihan sangat tinggi di Jawa Timur sebesar 55,2 persen dan itu bahkan lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Lebih dari seperempat pekerja rumahan juga bekerja dengan jam kerja berlebihan di Sumatera Utara (27,33 persen), Jawa Barat (40,4 persen) dan Banten (33,7 persen).

Tabel 20: Rata-rata waktu kerja pekerja rumahan dibandingkan dengan rata-rata provinsi

Provinsi	Pemetaan pekerja rumahan (%)			Provinsi (%)		
	Jam paruh waktu (kurang dari 35 jam)	Jam kerja rata-rata (35 hingga 47 jam)	Jam kerja berlebihan (48 jam atau lebih)	Jam paruh waktu (kurang dari 35 jam)	Jam kerja rata-rata (35 hingga 47 jam)	Jam kerja berlebihan (48 jam atau lebih)
Sumatera Utara	40,33	32,33	27,33	37,6	24,9	37,5
Jawa Barat	51,7	3,4	40,4	28,8	28,3	42,9
Jawa Tengah	39,7	37,3	22,9	36,6	27,0	36,4
D.I. Yogyakarta	53,8	30,0	16,3	33,3	31,8	34,9
Jawa Timur	43,8	1,0	55,2	40,7	25,2	34,1
Banten	44,1	1,4	33,7	23,8	34,6	41,6

Sumber: Data survei; Sakernas (2014) data mikro

Penelitian ini juga menemukan bahwa rata-rata jam kerja pekerja rumahan lebih panjang dari pada rata-rata jam kerja perempuan di angkatan kerja sebagaimana dideskripsikan di dalam statistik angkatan kerja Indonesia di hampir semua provinsi (Tabel 21). Pekerja rumahan bekerja antara 6 hingga 7 hari per minggu selama rata-rata 6 hingga 7 jam per hari. Di Indonesia rata-rata jam kerja per bulan adalah 42, dengan pekerja yang bekerja antara 5 hingga 6 hari per minggu selama 8 jam per hari. Oleh karena itu, dibandingkan dengan rata-rata, pekerja rumahan cenderung bekerja dengan jam kerja lebih sedikit per hari, tetapi lebih banyak hari per minggu.

Tabel 21: Rata-rata jam kerja untuk pekerja rumahan dan perempuan di angkatan kerja

Provinsi	Rata-rata jam kerja untuk pekerja rumahan	Rata-rata jam kerja untuk perempuan di angkatan kerja
Sumatera Utara	39	35
Jawa Barat	45	39
Jawa Tengah	38	36
D.I. Yogyakarta	-	36
Jawa Timur	-	36
Banten	40	40

²¹ ILO (2015), "Indonesia: Pekerja RUmahan di Jawa Timur – Temuan dari penelitian kualitatif" (ILO, Jakarta).

Sumber: Data survei; Sakernas (2014) datamikro

Penelitian ini juga melihat jam kerja menurut sektor ekonomi yang berbeda. Tabel 22 merangkum hasilnya. Secara umum pekerja rumahan di sektor kulit, barang kulit dan alas kaki cenderung memiliki jam kerja lebih panjang dari pada sektor lain kecuali di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jam kerja terpanjang adalah 66 jam oleh pekerja rumahan di sektor pengolahan tembakau di Jawa Timur. Jam kerja terpendek adalah 13 jam di kalangan pekerja rumahan dalam pengolahan makanan di Yogyakarta.

Tabel 22: Rata-rata jam kerja per minggu menurut sektor untuk pekerja rumahan

Sektor	Sumatera Utara		Jawa Barat		Jawa Tengah		D.I. Yogyakarta		Jawa Timur		Banten	
	Jml. pekerja	Jam	Jml. pekerja	Jam	Jml. pekerja	Jam	Jml. pekerja	Jam	Jml. pekerja	Jam	Jml. pekerja	Jam
Pengolahan makanan	144	38,3	116	47,8	95	30,7	11	13,0	85	50,1	38	45,9
Pengolahan minuman	10	43,3	2	30,0	N/A	N/A	N/A	N/A	4	46,3	1	42,0
Pengolahan tembakau	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1	66,0	N/A	N/A
Tekstil (pemintalan, tenun, pencelupan)	13	32,2	13	44,8	63	39,4	11	30,7	57	50,0	24	41,1
Pakaian jadi (menjahit baju)	29	37,3	232	40,2	126	38,5	13	36,5	62	48,6	50	35,6
Kulit, barang kulit dan alas kaki	13	56,5	36	36,5	70	57,6	29	38,6	44	40,2	60	43,3
Pengolahan kayu, bambu dan rotan	12	35,7	23	48,1	98	37,3	2	29,5	122	45,8	13	39,4
Furnitur	N/A	N/A	15	55,1	9	31,2	1	N/A	41	43,6	4	28,8
Manufaktur lain	79	40,7	367	37,5	318	33,6	13	32,0	294	46,6	146	39,8

Sumber: Data survei.

Ketika pekerja rumahan ditanya apakah mereka ingin bekerja lebih lam untuk mendapatkan upah tambahan, 40 persen responden menyatakan bahwa mereka bersedia, meskipun banyak dari pekerja rumahan ini sudah bekerja dengan jam yang melebihi jam kerja normal. Temuan ini merupakan indikasi upah rendah. Banyak pekerja rumahan bersedia bekerja dengan jam berlebihan guna untuk memberikan penghasilan bagi keluarga mereka. Bagi mereka, bekerja dengan jam kerja lebih sering dianggap sebagai satu-satunya pilihan yang mereka miliki untuk meningkatkan pendapatan mereka. Bekerja dengan jam kerja berlebihan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan produktivitas mereka. Meskipun tidak tercakup dalam penelitian ini, jumlah jam yang sebenarnya digunakan pekerja rumahan untuk melaksanakan pekerjaan mereka juga dapat berdampak pada kesehatan mereka. Karena pekerja rumahan pada umumnya melakukan beberapa tugas tanggung jawab rumah tangga dan mencari penghasilan, mereka mungkin melaksanakan pekerjaan rumahan pada larut malam setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Dalam hal ini, kesehatan para pekerja rumahan yang bekerja paruh waktu juga dapat terganggu karena waktu istirahat dan tidur mereka akan terganggu.

7.2 Upah pekerja rumahan

Upah rendah seringkali disebut sebagai salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pekerja rumahan. Sebagaimana ditunjukkan di Tabel 23 di bawah ini, upah rata-rata per bulan yang diterima oleh pekerja rumahan berkisar dari Rp. 377.331 hingga Rp. 1,2 juta per bulan di seluruh 6 provinsi yang disurvei dengan sebagian besar provinsi memiliki upah rata-rata

bulanan antara Rp. 377.000 dan Rp. 569.000. Data dari survei angkatan kerja pada bulan Agustus 2014 memperkirakan bahwa upah rata-rata untuk karyawan biasa di Indonesia adalah Rp. 1,9 juta, berkisar antara Rp. 1,4 juta dan Rp. 2,4 juta di provinsi-provinsi yang dicakup oleh penelitian ini. Rata-rata upah minimum nasional adalah Rp. 1,5 juta pada tahun 2014, berkisar antara Rp. 0,9 juta dan Rp. 1,5 juta di enam provinsi yang dicakup dalam penelitian ini. Membandingkan dengan upah rata-rata untuk karyawan biasa dan upah minimum rata-rata nasional, jelas bahwa upah yang diterima oleh pekerja rumahan jauh lebih rendah.

Secara rata-rata, besaran upah yang diterima memungkinkan pekerja rumahan untuk naik di atas garis kemiskinan provinsi. Namun, besaran upah tersebut biasanya di bawah 50 persen upah minimum dan di bawah 30 persen upah rata-rata. Terkecuali Jawa Barat di mana upah bulanan rata-rata pekerja rumahan (Rp. 908.489) mendekati upah minimum provinsi (Rp. 1 juta). Di Jawa Barat, rata-rata jam kerja pekerja rumahan lebih panjang dari provinsi lain (Tabel 21).

Tabel 23: Upah bulanan rata-rata pekerja rumahan (Rp.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((4)/(3))x100	(6)
Provinsi	Garis kemiskinan, per kapita per bulan	Upah bulanan rata-rata untuk karyawan biasa	Upah minimum ²²	Rasio Kaitz (%)	Upah bulanan rata-rata untuk pekerja rumahan
Sumatera Utara	330.663	1.730.339	1.505.850	87,0	377.331
Jawa Barat	291.474	1.950.345	1.000.000	51,3	908.489
Jawa Tengah	281.570	1.408.241	910.000	64,6	387.172
D.I. Yogyakarta	321.056	1.724.646	988.500	57,3	568.750
Jawa Timur	289.945	1.574.956	1.000.000	63,5	423.043
Banten	315.819	2.396.002	1.325.000	55,3	378.998
National	308.826	1.952.589	1.494.134	76,5	377.331

Sumber: Data survei; BPS (2014) Situasi Tenaga Kerja di Indonesia, Agustus 2014, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Ketika melihat upah bulanan rata-rata pekerja rumahan dibandingkan dengan upah rata-rata untuk karyawan biasa di bidang manufaktur, pekerja rumahan perempuan jelas kurang beruntung. Perempuan pada umumnya dibayar lebih rendah dari pada laki-laki di Indonesia, dengan kesenjangan upah gender diperkirakan 77,8 persen secara rata-rata untuk karyawan biasa di seluruh negeri. Perempuan di bidang manufaktur juga menerima upah lebih rendah dari pada laki-laki (Tabel 24). Selanjutnya, pendapatan pekerja rumahan cenderung kurang dari 50 persen upah yang diterima oleh karyawan perempuan biasa di sektor manufaktur.

²² Upah minimum di Indonesia ditentukan melalui sebuah proses tahunan yang dipimpin oleh dewan upah daerah otonom yang terdiri dari pekerja, pengusaha dan pemerintah, yang memperkirakan jumlah yang dibutuhkan oleh pekerja untuk mencapai “standar hidup layak minimum” atau “kebutuhan hidup layak” (KHL) untuk provinsi atau kabupaten tertentu.

Tabel 24: Upah rata-rata di sektor manufaktur untuk karyawan biasa dan pekerja rumahan (Rp.)

Provinsi	Upah rata-rata untuk karyawan biasa di bidang manufaktur		Upah bulanan rata-rata untuk pekerja rumahan
	Laki-laki	Perempuan	
Sumatera Utara	1.863.540	1.291.210	377.331
Jawa Barat	2.001.797	1.611.239	1.194.615
Jawa Tengah	1.228.142	826.709	387.172
D.I. Yogyakarta	1.317.739	919.364	568.750
Jawa Timur	1.711.444	1.161.389	423.043
Banten	2.433.929	2.033.729	378.998
Total	1.927.994	1.403.925	377.331

Sumber: Data survei; BPS (2014) *Situasi Tenaga Kerja di Indonesia, Agustus 2014*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Upah pekerja rumahan bervariasi berdasarkan sektor, jam kerja dan provinsi sebagaimana ditunjukkan di Tabel 25. Pendapatan rata-rata tertinggi pekerja rumahan ditemukan di sektor pengolahan makanan di Jawa Barat, sedangkan yang terendah ditemukan di sektor furnitur di Banten. Sektor furnitur menandai upah terendah juga di Jawa Barat dan Jawa Timur. Di Jawa Barat dan Jawa Timur, semua upah rata-rata berada di atas upah minimum. Di provinsi lainnya, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Yogyakarta, mereka yang bekerja di pengolahan makanan menerima upah terendah. Dengan pengecualian Jawa Barat dan Jawa Timur, pekerja rumahan yang diwawancarai dalam penelitian ini yang bekerja di pengolahan makanan tidak mendapatkan penghasilan cukup untuk naik di atas garis kemiskinan.

Sebagaimana disajikan oleh Tabel 26, ada variasi besar dalam upah rata-rata di berbagai provinsi berbeda bahkan untuk sektor yang sama, bahkan dengan mempertimbangkan perbedaan dalam jam kerja. Misalnya, upah bulanan rata-rata untuk pengolahan makanan adalah Rp. 1.222.112 di Jawa Barat, sedangkan Banten adalah Rp. 200.395. Penelitian ini tidak mampu mengeksplorasi faktor yang berkontribusi terhadap variasi yang sangat besar tersebut dan penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut. Kotak 5 di bawah ini mengilustrasikan pekerja rumahan perempuan dan upah mereka.

Tabel 25: Upah rata-rata menurut sektor untuk pekerja rumahan (Rp.)

Sumatera Utara	Upah rata-rata (Rp) per bulan	Jam kerja rata-rata per minggu
Pengolahan makanan	234.125	38,3
Pengolahan minuman	294.980	43,3
Pengolahan tembakau	N/A	N/A
Tekstil (pemintalan, tenun, pencelupan)	478.400	33,2
Pakaian jadi (menjahit baju)	563.103	37,3
Kulit, barang kulit dan alas kaki	1.023.153	56,5
Pengolahan kayu, bambu dan rotan	552.500	35,7
Furnitur	N/A	N/A
Manufaktur lain	431.082	40,7
Jawa Barat	Upah rata-rata (Rp) per bulan	Jam kerja rata-rata per minggu

Pengolahan makanan	1.222.112	47,8
Pengolahan minuman	1.000.000	30,0
Pengolahan tembakau	N/A	N/A
Tekstil (pemintalan, tenun, pencelupan)	1.194.615	44,8
Pakaian jadi (menjahit baju)	783.658	40,2
Kulit, barang kulit dan alas kaki	916.857	36,5
Pengolahan kayu, bambu dan rotan	903.478	48,1
Furnitur	604.667	55,1
Manufaktur lain	642.523	37,5
Jawa Tengah	Upah rata-rata (Rp) per bulan	Jam kerja rata-rata per minggu
Pengolahan makanan	267.121	30,7
Pengolahan minuman	N/A	N/A
Pengolahan tembakau	N/A	N/A
Tekstil (pemintalan, tenun, pencelupan)	449.015	39,4
Pakaian jadi (menjahit baju)	480.163	38,5
Kulit, barang kulit dan alas kaki	430.728	57,6
Pengolahan kayu, bambu dan rotan	342.538	37,3
Furnitur	445.888	31,2
Manufaktur lain	294.749	33,6
D.I. Yogyakarta	Upah rata-rata (Rp) per bulan	Jam kerja rata-rata per minggu
Pengolahan makanan	236.363	13,0
Pengolahan minuman	N/A	N/A
Pengolahan tembakau	N/A	N/A
Tekstil (pemintalan, tenun, pencelupan)	527.272	30,7
Pakaian jadi (menjahit baju)	750.769	36,5
Kulit, barang kulit dan alas kaki	705.172	38,6
Pengolahan kayu, bambu dan rotan	950.000	29,5
Furnitur	N/A	N/A
Manufaktur lain	359.230	32,0
Jawa Timur	Upah rata-rata (Rp) per bulan	Jam kerja rata-rata per minggu
Pengolahan makanan	556.259	50,1
Pengolahan minuman	320.000	46,3
Pengolahan tembakau	500.000	66,0
Tekstil (pemintalan, tenun, pencelupan)	430.684	50,0
Pakaian jadi (menjahit baju)	534.129	48,6
Kulit, barang kulit dan alas kaki	411.454	40,2
Pengolahan kayu, bambu dan rotan	535.606	45,8
Furnitur	296.146	43,6
Manufaktur lain	343.142	46,6
Banten	Upah rata-rata (Rp) per bulan	Jam kerja rata-rata per minggu
Pengolahan makanan	200.395	45,9
Pengolahan minuman	250.000	42,0
Pengolahan tembakau	N/A	N/A
Tekstil (pemintalan, tenun, pencelupan)	318.000	41,1
Pakaian jadi (menjahit baju)	370.408	35,6
Kulit, barang kulit dan alas kaki	859.704	43,3
Pengolahan kayu, bambu dan rotan	444.154	39,4
Furnitur	125.000	28,8
Manufaktur lain	464.323	39,8

Sumber: Data survei.

Kotak 5: Kasus Ibu Samiah dan Ibu Hani di Banten dan Ibu Sintha dan Ibu Lilis di Sumatera Utara²³

Ibu Samiah tinggal di Banten dan merupakan seorang pekerja rumahan di sektor pakaian jadi yang tidak pernah bersekolah. Dia membuang kelebihan benang dari kemeja untuk merek internasional yang terkenal. Menurut dia, kerja membuang benang tidak rumit dan tidak memerlukan banyak keterampilan. Dia hanya harus memotong kelebihan benang pada jahitan kemeja. Dalam satu hari, dia melaksanakan tugas ini untuk rata-rata 100 kemeja selama sembilan jam. Dia bekerja selama 6 hari seminggu. Dia menerima maksimal Rp. 500.000 per bulan untuk pekerjaan ini. Ini berarti bahwa

²³ Semua nama perorangan yang muncul di laporan ini telah dirubah untuk melindungi identitas perorangan tersebut.

dia menerima penghasilan rata-rata Rp. 20.830 per hari atau Rp. 2.975 per jam. Penghasilannya menempatkan dirinya jauh di bawah upah minimum kabupaten (Rp. 1,3 juta) dan hanya sedikit di atas garis kemiskinan (Rp. 0,3 juta).

Ibu Hani memiliki ijazah SLTA dan merupakan seorang pekerja rumahan di sektor furnitur di Banten. Dia melaksanakan tugas *finishing* untuk pembuatan jok mobil, termasuk memotong benang. Dia bekerja rata-rata selama 4 jam sehari dan 7 hari seminggu. Untuk satu kursi mobil, dia bekerja selama 2 jam dengan besaran upah per satuan Rp. 2.500 per unit. Dalam satu bulan dia mendapatkan Rp. 150.000. Ini berarti bahwa dia mendapatkan Rp. 5.000 dalam satu hari atau Rp. 1.250 per jam.

Baik Ibu Samiah maupun Ibu Hani menyelesaikan pekerjaan yang berada di tahap akhir dari proses produksi, yaitu tugas *finishing* atau memotong benang dari sisa jahitan. Ibu Samiah bekerja dengan jam kerja berlebihan dan Ibu Hani bekerja paruh waktu. Kedua pekerja tersebut sama-sama tidak mampu menghasilkan upah yang setara dengan upah minimum provinsi bahkan jika mereka bekerja penuh waktu. Ini juga menyoroti bahwa tingkat pendidikan tidak banyak memainkan peran dalam penghasilan bagi pekerja rumahan.

Ibu Sintha adalah seorang pekerja rumahan di Sumatera Utara dan pekerjaannya adalah memotong bawang. Meskipun dia bekerja dengan jam kerja panjang (63 jam per minggu), upah bulannya adalah Rp. 200.000 yang berada di bawah garis kemiskinan untuk Sumatera Utara (Rp. 330.517 untuk daerah perkotaan). Ibu Lilis, di sisi lain, bekerja 3 jam per hari dan 5 hari per minggu (15 jam per minggu total) menjahit pakaian, dan menerima upah bulanan Rp. 400.000.

Sumber: Diskusi kelompok terarah, Banten dan Sumatera Utara.

7.3 Mekanisme pembayaran pekerja rumahan

Penelitian ini menemukan bahwa penghasilan pekerja rumahan biasanya ditentukan dengan menggunakan sistem besaran per satuan. Di antara responden yang diwawancarai dalam penelitian ini, lebih dari 90 persen menyatakan bahwa mereka dibayar per unit yang mereka produksi (Lihat Tabel 26 untuk contoh besaran upah per satuan). Secara umum, kecenderungannya adalah semakin pendek waktu yang dibutuhkan, semakin rendah besaran upah per satuannya, dan sebaliknya.

Tabel 26: Contoh besaran upah per satuan

Provinsi	Contoh besaran upah per satuan
Sumatera Utara	- Menggunting bawang: Rp. 125 per kg (Pekerja rumahan dapat menyelesaikan 1 kg dalam 15 menit). - Membersihkan ikan: Rp. 3.000 per kg (Pekerja rumahan dapat menyelesaikan 10-15 kg dalam 4-8 jam per hari, dan menerima Rp. 30.000 – 45.000). - Mengupas udang: Rp. 2.700 per kg (Pekerja rumahan dapat menyelesaikan 1 kg dalam 2 jam).
Jawa Barat	- Menjahit sol sepatu bagian atas: Rp. 25.000 per 1 lusin pasang sepatu (Pekerja rumahan dapat menyelesaikan 1 lusin pasang sepatu per hari). - Membuat pangsit di Bandung: Rp. 600 per bungkus (Pekerja rumahan dapat menyelesaikan 30-50 bungkus dalam sehari, dan menerima Rp. 18.000 - Rp. 30.000).

	- Memilin serat kabel <i>charger</i> telepon seluler: Rp. 1000 per 1 bundel kabel (tiap bundel berisi 100 buah kabel serat). (Pekerja rumahan bisa menyelesaikan sekitar 10-15 bundel per hari, dan menerima Rp. 10.000 - Rp. 15.000).
Jawa Tengah	- Membungkus sedotan: Rp. 5.000 per 5 bungkus (Pekerja rumahan dapat menyelesaikan 5 bungkus dalam 6 jam). - Membatik: Rp. 5.000 per unit (Pekerja rumahan dapat menyelesaikan 1 unit dalam 3 jam).
Yogyakarta	- Bekerja pada industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya: Rp. 500 per unit (Pekerja rumahan dapat menyelesaikan 1 unit dalam sekitar 30 menit) - Bekerja pada pakaian industri: Rp. 1.500 per pakaian (Pekerja rumahan dapat menyelesaikan 1 pakaian dalam 45 menit)
Jawa Timur	- Memasang senar untuk raket bulutangkis: Rp. 2.500 per lusin (Pekerja rumahan dapat menyelesaikan 12 raket dalam 2 jam). - Memotong tali sandal: Rp. 7.000 per lusin pasang (Pekerja rumahan dapat 5-6 lusin per hari, dan menerima Rp. 35.000 - Rp. 42.000). - Merakit tutup panci: Rp. 1.000 per lembar tutup panci (Pekerja rumahan dapat menyelesaikan 20-50 lembar tutup panci dalam 8-10 jam per hari dengan bantuan dari anggota keluarga, dan menerima Rp. 20.000 - 50.000).
Banten	- Membuang benang dari kemeja: Rp. 115 per kemeja (Jika pekerja rumahan dapat menyelesaikan 100 kemeja dalam satu hari, mereka menerima Rp. 11.500). - Membuang benang dari kaos: Rp. 60 per kaos (Pekerja rumahan menerima 30-60 kaos dalam satu hari untuk diselesaikan, dan menerima Rp. 1.800 - 3.600 per hari).

Sumber: Data survei; data dari proyek ILO/MAMPU.

Penelitian ini menemukan bahwa besaran upah per satuan sebagian besar pekerja rumahan ditentukan oleh pemberi kerja mereka tanpa perundingan. Misalnya, di Sumatera Utara 97,67 persen pekerja rumahan yang diwawancarai melaporkan bahwa pemberi kerja mereka menentukan besaran upah per satuan mereka. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten masing-masing 76,9 persen, 84,5 persen, 89,7 persen dan 85,1 persen. Hanya sebagian kecil pekerja rumahan menentukan sendiri atau merundingkan besaran upah mereka. Informasi dari diskusi kelompok terarah menjelaskan lebih lanjut bahwa mereka menerima besaran upah per satuan tanpa perundingan karena dua faktor, meliputi i) takut kehilangan pekerjaan mereka dan ii) takut persaingan dari pekerja lain. Pekerja rumahan jelas berada dalam posisi tawar yang lemah.

Pemberitahuan tentang besaran upah per satuan sebelum mulai mengerjakan pesanan kerja memberi pekerja rumahan kejelasan dalam hal pendapatan mereka nantinya. Menurut penelitian ini, lebih dari 80 persen pekerja rumahan pada umumnya diberitahu besaran upah per satuan mereka sebelum mulai bekerja. Selain itu, pekerja rumahan melaporkan bahwa mereka pada umumnya dibayar langsung oleh pemberi kerja atau perantara untuk pekerjaan mereka, dengan 90 persen sampel menunjukkan bahwa mereka dibayar langsung tanpa tanda terima. Terkecuali kasus Yogyakarta. Di Yogyakarta hanya 72,5 persen responden menyatakan bahwa mereka dibayar langsung untuk pekerjaan rumahan mereka, responden lainnya menunjukkan bahwa pasangan mereka atau anggota keluarga mereka lainnya menerima pembayaran. Situasi di Yogyakarta mungkin menunjukkan bahwa sebagian pekerja

rumahan mungkin tidak memiliki kendali penuh atas upah yang mereka peroleh karena keterlibatan pasangan mereka atau anggota keluarga lainnya dalam menerima pembayaran.

Dalam hal ketepatan waktu pembayaran, penelitian ini menemukan bahwa pekerja rumahan biasanya dibayar setelah mereka mengirimkan produk, tetapi pengaturan untuk pembayaran dapat bervariasi. Contohnya, sebagian pekerja rumahan yang diwawancarai dalam penelitian ini dibayar pada saat mereka mengirimkan produk. Ada juga pekerja rumahan yang dibayar baru setelah produk yang mereka produksi telah dijual oleh pemberi kerja mereka. Tabel 27 merangkum ketepatan waktu pembayaran untuk pekerjaan rumahan. Tabel ini menunjukkan bahwa banyak pekerja rumahan dibayar pada saat pengiriman (40,9 persen) ataupun antara 1 dan 15 hari setelah mereka mengirimkan produk (42,2%). Sekitar 17 persen pekerja rumahan menerima pembayaran lebih dari 15 hari setelah pengiriman. Perlu disoroti bahwa 59,1 persen responden mengalami keterlambatan dalam menerima pembayaran. Ini menunjukkan bahwa resiko produksi dibebankan pada pekerja rumahan. Bagi pekerja rumahan, keterlambatan pembayaran berhubungan langsung dengan berbagai resiko karena mereka mungkin tidak memiliki penghasilan lain untuk melindungi mereka dari sakit mendadak atau cedera, yang selanjutnya akan berdampak pada kemampuan mereka untuk memperoleh pendapatan.

Tabel 27: Waktu pembayaran dan pekerjaan rumahan

Provinsi	Saat pengiriman		1 hingga 15 hari setelah pengiriman		16 hingga 30 hari setelah pengiriman		Lebih dari 30 hari setelah pengiriman	
	Jumlah di sampel	% sampel	Jumlah di sampel	% sampel	Jumlah di sampel	% sampel	Jumlah di sampel	% sampel
Sumatera Utara	106	35,3	139	46,3	47	15,7	8	2,7
Jawa Barat	388	48,3	273	34,0	129	16,0	14	1,7
Jawa Tengah	318	40,8	335	42,9	84	10,8	43	5,5
D.I. Yogyakarta	31	38,8	40	50,0	8	10,0	1	1,3
Jawa Timur	313	44,0	300	42,3	60	8,5	37	5,2
Banten	81	24,1	180	53,6	54	16,1	21	6,3
Total /rata-rata	1228	40,9	1267	42,2	382	12,7	124	4,1

Sumber: Data survei.

7.4 Keuntungan dan kesulitan

Keuntungan utama yang diungkapkan oleh pekerja rumahan adalah bahwa mereka mampu mendapatkan penghasilan dengan beberapa fleksibilitas untuk menjadwalkan kerja sementara di rumah dan kemungkinan untuk mengelola beberapa tugas atau kegiatan yang berhubungan dengan menghasilkan pendapatan serta tanggung jawab rumah tangga. Mayoritas pekerja rumahan melaporkan bahwa mereka melakukan pengasuhan anak sembari bekerja rumahan. Bagian sampel yang lain melaporkan bahwa mereka mendapatkan bantuan dari anggota keluarga lain dalam mengurus anak atau mengerjakan pekerjaan rumahan saat anak-anak mereka bersekolah.

Sebagaimana ditunjukkan di Tabel 28, kesulitan paling umum yang diungkapkan oleh pekerja rumahan terkait dengan rendahnya tingkat upah (52,25 persen), diikuti oleh ketidakpastian dalam pesanan kerja (33 persen). Kesulitan lain terkait dengan ketidakmampuan mereka untuk berunding dengan perantara dan akses ke infrastruktur. Kesulitan utama yang

diungkapkan oleh peserta diskusi kelompok terarah adalah serupa dan mereka menyebutkan upah rendah, ketidakstabilan pesanan kerja, dan pasokan bahan baku. Sementara kemampuan melakukan beberapa tugas sekaligus (*multi-tasking*) dikemukakan sebagai keuntungan utama oleh banyak responden, sebagian pekerja rumahan di dalam diskusi kelompok terarah memandangnya sebagai kerugian karena membutuhkan banyak energi agar bisa efektif dalam melaksanakan beberapa tugas secara bersamaan. Pekerja rumahan lainnya juga menunjukkan kerugian lain dari pekerjaan rumahan yang membuat rumah mereka berantakan karena bahan baku dan peralatan memenuhi ruang terbatas yang mereka miliki di rumah. Pekerjaan rumahan juga dapat berdampak pada kesehatan pekerja rumahan dan keluarga mereka karena sebagian bahan baku atau peralatan mungkin berbahaya. Keluhan lain meliputi pekerjaan rumahan mengganggu waktu keluarga, dan mereka tidak diberi peralatan atau fasilitas kerja dalam mendukung pekerjaan mereka.

Tabel 28: Kesulitan yang dihadapi oleh pekerja rumahan

Kesulitan	Sumatera Utara		Jawa Barat		Jawa Tengah		D.I. Yogyakarta		Jawa Timur		Banten	
	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%
Buruknya akses ke infrastruktur dasar	28	9,3	147	18,3	65	5,8	2	2,1	52	4,5	7	2,3
Kurangnya pendidikan, pelatihan atau keterampilan	22	7,3	88	10,9	38	3,4	3	3,2	33	2,9	11	3,6
Tingginya biaya transportasi	8	2,7	58	7,2	97	8,7	4	4,2	69	6,0	20	6,5
Pesanan kerja tidak konsisten	122	40,7	351	43,7	242	21,6	20	21,1	353	30,6	124	40,3
Upah terlalu rendah	183	61,0	422	52,5	519	46,3	47	49,5	372	32,3	241	71,9
Biaya bahan dan alat terlalu tinggi	16	5,3	36	4,5	60	5,4	9	9,5	26	2,3	3	1,0
Ketidakmampuan berunding dengan perantara	41	13,7	84	10,4	99	8,8	10	10,5	112	9,7	5	1,6
Lainnya	29	9,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	135	11,7	N/A	N/A

Sumber: Data survei.

8. Perlindungan sosial dan keselamatan dan kesehatan pekerja rumahan

Perlindungan sosial

Indonesia memiliki banyak program bantuan sosial dan asuransi sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan melindungi penduduk usia kerja. Pertanyaannya adalah apakah pekerja rumahan memiliki akses ke program-program ini. Tabel 28 menunjukkan bahwa pekerja rumahan memiliki akses terbatas ke program bantuan sosial dan asuransi sosial

pemerintah, dengan sekitar 40 persen dari sampel tidak memiliki akses ke bentuk perlindungan sosial atau asuransi sosial apapun. Jika pekerja rumahan memiliki akses ke program perlindungan sosial, yang paling umum adalah program asuransi kesehatan atau program beras untuk rakyat miskin. Namun, di antara pekerja rumahan yang melaporkan terdaftar di asuransi kesehatan atau asuransi ketenagakerjaan, sebagian besar bukan merupakan anggota aktif yang membayar kontribusi meskipun mereka masih memiliki kartu keanggotaan mereka, yang menunjukkan bahwa kemungkinan terbesar adalah bahwa mereka memenuhi syarat untuk mengakses skema tersebut karena mereka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Sebagaimana terlihat dari upah bulanan rata-rata pekerja rumahan (Tabel 23), upah rata-rata pekerja rumahan tepat di atas garis kemiskinan, meskipun itu adalah 50 persen dari upah minimum dan kurang dari 30 persen dari upah rata-rata, dan ini menjelaskan bahwa sebagian besar pekerja rumahan tidak akan memenuhi syarat untuk mengakses skema bagi masyarakat miskin. Alasan utama buruknya akses ke program perlindungan sosial adalah rendahnya tingkat kesadaran, dan bahwa pekerjaan suami mereka tidak memberikan akses ke asuransi kesehatan, dan biaya asuransi dipandang terlalu tinggi untuk rumah tangga mereka (misalnya Rp. 50.000 per bulan).

Tabel 29: Pekerja rumahan yang mendapat program bantuan dan asuransi sosial

Sumatera Utara	Number in sample	Sample average (%)
Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	24	8,0
Jamkesmas/BPJS Kesehatan	82	27,3
Membeli/mendapat beras miskin (RASKIN)	64	21,3
Program Keluarga Harapan (PKH)	4	1,3
Surat Miskin (SKTM)	7	2,3
Kartu Sehat	6	2,0
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	11	3,7
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	N/A	N/A
Tidak ada	115	38,3
Lainnya	25	8,3
Jawa Barat	Number in sample	Sample average
Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	25	3,1
Jamkesmas/BPJS Kesehatan	123	15,3
Membeli/mendapat beras miskin (RASKIN)	275	34,2
Program Keluarga Harapan (PKH)	21	2,6
Surat Miskin (SKTM)	103	12,8
Kartu Sehat	12	1,5
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	9	1,1
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	8	1,0
Tidak ada	339	42,2
Lainnya	0	0,0
Jawa Tengah	Number in sample	Sample average
Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	25	2,3
Jamkesmas/BPJS Kesehatan	299	27,7
Membeli/mendapat beras miskin (RASKIN)	325	30,1
Program Keluarga Harapan (PKH)	28	2,6
Surat Miskin (SKTM)	46	4,3
Kartu Sehat	44	4,1
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	52	4,8
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	14	1,3
Tidak ada	247	22,9
Lainnya	N/A	N/A
DIY	Number in sample	Sample average
Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	N/A	N/A
Jamkesmas/BPJS Kesehatan	42	35,0

Membeli/mendapat beras miskin (RASKIN)	33	27,5
Program Keluarga Harapan (PKH)	5	4,2
Surat Miskin (SKTM)	N/A	N/A
Kartu Sehat	1	0,8
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	4	3,3
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	4	3,3
Tidak ada	22	18,3
Lainnya	9	7,5
Jawa Timur	Number in sample	Sample average
Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	20	2,8
Jamkesmas/BPJS Kesehatan	123	17,3
Membeli/mendapat beras miskin (RASKIN)	247	34,8
Program Keluarga Harapan (PKH)	31	4,4
Surat Miskin (SKTM)	90	12,7
Kartu Sehat	12	1,7
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	9	1,3
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	8	1,1
Tidak ada	307	43,2
Lainnya	74	10,4
Banten	Number in sample	Sample average
Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	13	3,8
Jamkesmas/BPJS Kesehatan	87	25,7
Membeli/mendapat beras miskin (RASKIN)	66	19,5
Program Keluarga Harapan (PKH)	1	0,3
Surat Miskin (SKTM)	6	1,8
Kartu Sehat	6	1,8
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	1	0,3
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	2	0,6
Tidak ada	156	46,2
Lainnya	N/A	N/A

Sumber: Data survei.

Pasal 99 UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 menyatakan bahwa semua pekerja berhak atas jaminan sosial, namun, saat ini belum ada pengaturan yang fleksibel yang secara memadai mendukung pekerja musiman atau pekerja lepas untuk memastikan hak ini. Selain itu, hanya 1 dari 4 karyawan upahan reguler di sektor formal yang saat ini aktif memberikan kontribusi untuk program-program seperti dana pensiun dan dana tabungan hari tua.²⁴ Menurut data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, cakupan pekerja rumahan oleh program asuransi ketenagakerjaan bahkan lebih rendah, dengan hanya 1 dari setiap 30 pekerja rumahan memiliki akses ke program-program semacam itu. Rendahnya tingkat cakupan di kalangan pekerja rumahan bukanlah tidak terduga, karena mayoritas kontrak antara pekerja rumahan dan pemberi kerja mereka adalah informal.

Berkenaan dengan kehamilan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa saat hamil mayoritas pekerja rumahan melakukan pemeriksaan pada bidan, perawat atau dokter kandungan atau ginekolog. Hasilnya campuran untuk kesehatan pasca melahirkan. Misalnya, di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, masing-masing 67,3 persen, 54,2 persen, 69,6 persen dan 64,9 persen dari sampel menyelesaikan konsultasi tindak lanjut enam minggu setelah melahirkan. Di Yogyakarta dan Banten, hasilnya lebih tinggi, dengan masing-masing 86,3 persen dan 85,7 persen dari sampel melakukan konsultasi pasca

²⁴ BPJS Ketenagakerjaan (2014), "Laporan tahunan", (BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta).

melahirkan, dan itu menunjukkan bahwa perawatan kesehatan pasca melahirkan sangat kurang diakses atau dimanfaatkan oleh pekerja rumahan.

Keselamatan dan kesehatan kerja

Sementara sebagian besar pekerja rumahan yang diwawancarai dalam penelitian ini menyatakan bahwa kondisi kesehatan mereka berada pada tingkat yang normal atau baik, para perempuan yang diwawancarai masih melaporkan berbagai keluhan kesehatan, meliputi sesekali demam, batuk dan sakit kepala. Responden pada umumnya melaporkan bahwa sakit ini tidak mengganggu secara substansial terhadap kegiatan kerja mereka dan bahwa mereka beristirahat kerja atas keinginan mereka sendiri bila sakit.

Namun, perilaku dan pilihan mereka untuk beristirahat kerja dipengaruhi oleh kekhawatiran akan berkurangnya pesanan kerja dari perantara jika mereka tidak bisa menyelesaikan pesanan kerja tepat waktu. Mereka juga tidak mampu untuk beristirahat karena beristirahat dan tidak bekerja untuk menyelesaikan pesanan berdampak langsung pada pendapatan mereka sebagai pekerja rumahan yang dibayar berdasarkan jumlah produk yang diselesaikan. Pekerja rumahan melaporkan bahwa karena bekerja dari rumah, kehidupan kerja mereka sulit untuk dipisahkan dari kehidupan rumah mereka, sehingga mereka sering tetap bekerja ketika sakit yang dapat berujung pada semakin lamanya waktu pemulihan dan semakin rendahnya produktivitas.

Diskusi kelompok terarah mengungkapkan beberapa hal terkait dengan kesehatan, khususnya mengenai stres dan kurangnya kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Misalnya, pekerja rumahan sering melaporkan mengalami stres karena rendahnya tingkat pendapatan dan tidak mampu membayar biaya sekolah atau memenuhi kewajiban hutang. Selain itu, pekerja rumahan yang bekerja di industri-industri tertentu, misalnya menempelkan bantalan busa di helm untuk sepeda motor, melaporkan bahwa asap seringkali membuat mereka merasa sesak napas dan mati rasa di tangan dan jari-jari mereka.

Tabel 30 menunjukkan hubungan antara kecelakaan kerja berdasarkan sektor ekonomi. Rata-rata responden yang diwawancarai menunjukkan bahwa mereka mengambil libur 2 hari karena kecelakaan kerja pada tahun lalu. Data menunjukkan bahwa kegiatan kerja dengan waktu pemulihan terpanjang juga memiliki kejadian kecelakaan kerja paling sering. Misalnya, pekerja rumahan di sektor garmen dan tekstil cenderung memiliki kejadian kecelakaan kerja tertinggi dan waktu pemulihan terpanjang. Pemberian pelatihan, misalnya pelatihan keselamatan dan kesehatan, adalah penting untuk memastikan kesehatan pekerja dan mengurangi cedera terkait kerja yang bisa melemahkan potensi produktif pekerja rumahan.

Tabel 30: Hari-hari yang hilang karena kecelakaan kerja oleh pekerja rumahan

Sumatera Utara	Hari hilang minimum	Hari hilang maksimum	Rata-rata hari hilang
Pengolahan makanan	0	14	0.89
Pengolahan minuman	0	2	0.40
Pengolahan tembakau	N/A	N/A	N/A
Tekstil (pemintalan, tenun, pencelupan)	0	15	3.23
Pakaian jadi (menjahit baju)	0	7	1.31
Kulit, barang kulit dan alas kaki	0	4	1.23
Pengolahan kayu, bambu dan rotan	0	7	1.17

Furnitur	N/A	N/A	N/A
Manufaktur lain	0	28	1.29
Jawa Barat	Hari hilang minimum	Hari hilang maksimum	Rata-rata hari hilang
Pengolahan makanan	0	7	2.0
Pengolahan minuman	N/A	N/A	N/A
Pengolahan tembakau	N/A	N/A	N/A
Tekstil (pemintalan, tenun, pencelupan)	0	7	2.2
Pakaian jadi (menjahit baju)	0	7	1.8
Kulit, barang kulit dan alas kaki	0	3	0.7
Pengolahan kayu, bambu dan rotan	0	7	2.9
Furnitur	0	2	1.0
Manufaktur lain	0	10	1.7
Jawa Tengah	Hari hilang minimum	Hari hilang maksimum	Rata-rata hari hilang
Pengolahan makanan	1	30	4
Pengolahan minuman	N/A	N/A	N/A
Pengolahan tembakau	N/A	N/A	N/A
Tekstil (pemintalan, tenun, pencelupan)	0	60	8
Pakaian jadi (menjahit baju)	0	14	3
Kulit, barang kulit dan alas kaki	1	31	6
Pengolahan kayu, bambu dan rotan	0	7	2
Furnitur	1	14	5
Manufaktur lain	1	90	5
DIY	Hari hilang minimum	Hari hilang maksimum	Rata-rata hari hilang
Pengolahan makanan	0	1	1
Pengolahan minuman	N/A	N/A	N/A
Pengolahan tembakau	N/A	N/A	N/A
Tekstil (pemintalan, tenun, pencelupan)	1	3	2
Pakaian jadi (menjahit baju)	0	1	1
Kulit, barang kulit dan alas kaki	1	3	2
Pengolahan kayu, bambu dan rotan	1	1	1
Furnitur	2	2	2
Manufaktur lain	1	3	2
Jawa Timur	Hari hilang minimum	Hari hilang maksimum	Rata-rata hari hilang
Pengolahan makanan	0	75	3
Pengolahan minuman	0	14	4
Pengolahan tembakau	2	2	2
Tekstil (pemintalan, tenun, pencelupan)	0	14	1.66
Pakaian jadi (menjahit baju)	0	30	1.85
Kulit, barang kulit dan alas kaki	0	30	1.70
Pengolahan kayu, bambu dan rotan	0	60	1.67
Furnitur	0	7	2.24
Manufaktur lain	0	65	1.21
Banten	Hari hilang minimum	Hari hilang maksimum	Rata-rata hari hilang
Pengolahan makanan	1	2	1.9
Pengolahan minuman	N/A	N/A	N/A
Pengolahan tembakau	N/A	N/A	N/A
Tekstil (pemintalan, tenun, pencelupan)	2	3	2.3
Pakaian jadi (menjahit baju)	1	4	2.4
Kulit, barang kulit dan alas kaki	0	3	1.1
Pengolahan kayu, bambu dan rotan	2	2	2
Furnitur	N/A	N/A	N/A
Manufaktur lain	0	7	1.5

Sumber: Data survei.

Penelitian ini juga menanyakan kepada para responden tentang kesadaran mereka tentang HIV/AIDS, menyusul tren yang berkembang dalam hal jumlah ibu rumah tangga terinfeksi HIV di Indonesia.²⁵ Ketika ditanya tentang kesadaran mereka, lebih dari 70 persen dari sampel

²⁵ Kementerian Kesehatan (2014), "Laporan situasi HIV/AIDS di Indonesia", (Kementerian Kesehatan, Jakarta).

menyatakan bahwa mereka telah mendengar tentang HIV/AIDS dari berbagai sumber. Namun, ketika ditanya apakah mereka pernah diuji HIV, sebagian besar (lebih dari 97 persen) mengatakan mereka belum pernah diuji.

9. Asosiasi dan perundingan bersama

Karena pekerja rumahan bekerja di rumah terisolasi dari orang lain, mereka terbatas atau tidak memiliki akses ke informasi atau sumber daya lain yang mendukung mereka dalam meningkatkan kondisi kerja dan hidup mereka. Sebagai seorang pekerja perorangan, pekerja rumahan berada dalam posisi lemah ketika bernegosiasi dengan pemberi kerja atau perantara mereka untuk meningkatkan kondisi kerja, dan pengorganisasian telah digunakan sebagai strategi yang berhasil untuk meningkatkan mata pencaharian pekerja rumahan di banyak belahan dunia. Penelitian ini melihat keterlibatan pekerja rumahan dalam kelompok, asosiasi atau organisasi di enam provinsi.

Sebagian besar pekerja rumahan di Yogyakarta (90 persen) ditemukan mengikuti sebuah kelompok secara rutin. Proporsi pekerja rumahan yang mengikuti kelompok di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara adalah 58,0 persen, 53,2 persen dan 47,67 persen. Proporsi tersebut rendah di Jawa Barat dan Banten dengan 21,6 persen dan 16,7 persen. Alasan tidak mengikuti sebuah kelompok terkait dengan tidak adanya kelompok atau organisasi serta kurangnya waktu.

Sebagian besar pekerja rumahan yang menjadi anggota kelompok terlibat dalam kelompok desa tradisional atau dalam kelompok keagamaan perempuan, misalnya *perwiridan perempuan*. Kelompok-kelompok semacam itu merupakan bagian dari struktur dan hierarki kekuasaan desa tradisional dan mereka jarang berbicara tentang pekerjaan dan kondisi kerja. Dengan demikian, struktur tradisional ini mungkin tidak memberikan platform untuk bekerja bersama, terutama dalam kaitannya dengan mewujudkan hak-hak di tempat kerja. Namun, praktik pergi keluar untuk menghadiri pertemuan dengan kelompok atau organisasi dapat digunakan sebagai dasar bagi pekerja rumahan untuk mulai berorganisasi untuk melakukan tindakan bersama.

Tabel 31 menyajikan tanggapan pekerja rumahan terkait dengan negosiasi dan perundingan dengan pemberi kerja mereka. Tabel ini menunjukkan bahwa 62,8 persen pekerja rumahan yang diwawancarai tidak pernah bernegosiasi dengan pemberi kerja mereka tentang upah atau kondisi kerja. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja rumahan menerima ketentuan kerja sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja mereka dan bahwa mereka tidak berpandangan bahwa ketentuan kerja bisa dinegosiasikan atau mereka tidak memiliki kapasitas untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja mereka. Memang, data dari diskusi kelompok terarah menunjukkan bahwa mayoritas pekerja rumahan khawatir kehilangan pekerjaan mereka. Khususnya, mereka takut pemberi kerja tidak akan lagi memberi mereka pekerjaan jika mereka mencoba untuk melakukan perundingan untuk kondisi kerja yang lebih baik dan upah yang lebih baik.

Tabel 31: Pekerja rumahan dan perundingan

Provinsi	Ya, berunding sendiri secara mandiri		Ya, bersama dengan pekerja rumahan lain		Ya, didukung oleh LSM lokal		Tidak, belum pernah bernegosiasi	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumatera Utara	89	29,7	38	13,0	0	0,0	172	57,3
Jawa Barat	128	15,9	168	20,9	0	0,0	508	63,2
Jawa Tengah	148	26,8	69	9,7	1	0,1	492	69,2
D.I. Yogyakarta	19	23,8	1	1,3	0	0,0	60	75,0
Jawa Timur	206	26,4	101	12,9	11	1,4	462	59,2
Banten	176	52,4	35	10,4	0	0,0	125	37,2
Total/rata-rata	650	22,5	412	14,3	12	0,4	1813	62,8

Sumber: Data survei.

Hampir sepertiga pekerja rumahan menyatakan bahwa mereka telah berunding dengan pemberi kerja mereka secara mandiri atau bersama dengan pekerja rumahan lainnya. Ini menunjukkan bahwa sejumlah kecil pekerja rumahan telah mengorganisir diri guna untuk berunding dengan pemberi kerja mereka. Namun, pekerja rumahan belum didukung oleh serikat pekerja atau lembaga swadaya masyarakat lainnya dalam negosiasi. Ini kemungkinan karena terbatasnya akses ke organisasi semacam itu dan/atau terbatasnya pemahaman tentang peran organisasi dan strategi negosiasi. Sebagian pekerja sebelumnya bekerja di pabrik dan menjadi anggota serikat pekerja dan baru belakangan menjadi pekerja rumahan. Mereka menyebutkan bahwa serikat pekerja menentang pekerjaan rumahan karena merupakan satu bentuk alih daya dan mereka berpendapat bahwa eksploitasi tenaga kerja adalah lazim terjadi di kalangan pekerja rumahan. Oleh karena itu sebagian pekerja rumahan *enggan* mendekati serikat pekerja untuk meminta dukungan.

Dalam diskusi kelompok terarah, pekerja rumahan melaporkan bahwa mereka pada umumnya lebih menyukai perundingan bersama ketimbang perundingan mandiri, karena perundingan mandiri dapat dianggap memicu persaingan dengan pekerja rumahan lainnya. Namun, banyak pekerja rumahan memutuskan untuk bernegosiasi secara perorangan karena pekerja rumahan lainnya tidak ingin menghadapi resiko kehilangan pekerjaan mereka melalui negosiasi.

Selain itu, diskusi kelompok terarah di Jawa Barat menyoroti bahwa pekerja rumahan tidak siap dalam kasus di mana pekerja rumahan bernegosiasi bersama, dan bahwa organisasi mereka cenderung spontan dan berbasis di sekitar isu tunggal. Setelah isu tersebut terselesaikan dengan pemberi kerja, pekerja rumahan kembali ke kegiatan normal mereka dan tidak merawat forum organisasi. Kotak 6 dan 7 memberikan ilustrasi lebih lanjut tentang pengalaman pekerja rumahan bernegosiasi.

Kotak 6: Pekerja rumahan dan negosiasi di Jawa Barat

Pekerja rumahan perempuan di Kecamatan Dayeuh Kolot (Kota Bandung) menerima pesanan menjahit sol sepatu ke bagian atas sepatu seharga Rp. 25.000 per lusin. Pekerja rumahan di Kecamatan ini menerima tawaran ini dan karena para pekerja rumahan ini tidak memiliki pengalaman dalam menjahit sol sepatu, mereka mendapatkan pelatihan dari perantara tentang keterampilan ini selama

satu minggu. Setelah pekerjaan dimulai, para pekerja rumahan mendapati bahwa mereka bisa menyelesaikan 12 pasang sepatu (satu lusin) dalam satu hari. Mereka kemudian merasa bahwa besaran upah per satuan yang ditawarkan terlalu rendah mengingat waktu yang harus mereka curahkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut dan kebutuhan keluarga mereka atas penghasilan tambahan.

Para pekerja rumahan ini mencoba untuk bernegosiasi dengan perantara mereka untuk meningkatkan besaran upah per satuan untuk pekerjaan ini, tetapi perantara memberitahu mereka bahwa pemberi kerja di pabrik merupakan satu-satunya orang yang memiliki kewenangan untuk menyesuaikan besaran upah per satuan. Perantara menyarankan agar pekerja rumahan bernegosiasi dengan pemberi kerja. Saran ini dilaksanakan oleh pekerja rumahan. Bersama-sama, mereka menemui pemberi kerja dan menegosiasikan kenaikan besaran upah per satuan. Namun, mereka tidak sepakat tentang jumlah yang ingin mereka rundingkan secara nominal sebelum pertemuan, yang membuat mereka berada dalam posisi kurang menguntungkan. Dalam pertemuan tersebut, pemberi kerja menyetujui kenaikan Rp. 1.000 per lusin pasang sepatu, sehingga membuat besaran upah per satuan yang baru Rp. 26.000 per lusin pasang sepatu. Pekerja rumahan menerima tawaran ini.

Sumber: Diskusi kelompok terarah, Jawa Barat.

Kotak 7: Pekerja rumahan dan negosiasi di Banten

Ibu Mutia adalah seorang perantara dan pekerja rumahan dari Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Dia memiliki dua pekerjaan karena pendapatan yang diterimanya dari pekerjaannya sebagai perantara tidak cukup untuk menutup biaya hidupnya. Sebagai perantara, Ibu Mutia mendistribusikan pesanan kerja ke kerabatnya yang tinggal di sekitar lingkungannya. Sebagai pekerja rumahan, kegiatan utamanya adalah menjahit lengan ke kemeja untuk merek yang terkenal secara internasional.

Ketika Ibu Mutia mulai bekerja sebagai pekerja rumahan dan perantara, dia mendapatkan Rp. 100 per satuan untuk menjahit lengan ke kemeja, serta Rp. 50 per satuan untuk mengirimkan produk jadi ke pabrik. Namun, Ibu Mutia, dan juga pekerja rumahan yang dipekerjakannya, menganggap besaran upah per satuan untuk pekerjaan ini sangat rendah. Mereka mengadakan pertemuan tim dan memutuskan bahwa mereka ingin berunding untuk kenaikan besaran upah per satuan untuk produk-produk yang mereka produksi. Mereka pergi sebagai sebuah kelompok untuk berbicara dengan pemberi kerja. Namun, mereka tidak bersama-sama memutuskan berapa yang ingin mereka ajukan untuk besaran upah per satuan yang baru sebelum bertemu dengan pemberi kerja.

Pabrik yang bekerja dengan para pekerja rumahan tersebut adalah sebuah perusahaan swasta yang merupakan sub-kontraktor sebuah perusahaan yang lebih besar di Jakarta. Setelah berdiskusi dengan Ibu Mutia dan pekerja rumahan, pemilik pabrik menawarkan untuk menaikkan besaran upah per satuan untuk menjahit lengan ke kemeja sebesar Rp. 25, sehingga pekerja rumahan akan menerima Rp. 125 per satuan, sementara Ibu Mutia masih akan menerima Rp. 50 per satuan sebagai perantara untuk pengiriman produk. Tawaran ini diterima oleh pekerja rumahan.

Sumber: Diskusi kelompok terarah, Banten.

10. Kesimpulan dan rekomendasi

Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan situasi dan kondisi kerja pekerja rumahan perempuan yang sebagian besar tak terlihat di enam provinsi, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten, di Indonesia. Temuan-temuannya menegaskan bahwa pekerja rumahan ini memberi kontribusi penting untuk perekonomian rumah tangga dan di luarnya. Namun, mereka bekerja dalam kondisi di bawah standar dan bahwa diperlukan upaya oleh berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kondisi hidup dan kerja para pekerja ini. Temuan-temuan kunci adalah sebagai berikut:

- Provinsi-provinsi yang disurvei memiliki jumlah orang miskin relatif tinggi meskipun kinerja ekonominya baik. Ada juga sejumlah besar perempuan yang tidak aktif secara ekonomi di provinsi-provinsi tersebut karena melakukan perawatan rumah, yang menunjukkan bahwa banyak perempuan terus bertanggung jawab atas perawatan rumah dan perawatan rumah merupakan faktor kunci penghambat partisipasi angkatan kerja perempuan. Kebutuhan akan pendapatan di kalangan keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi dipadukan dengan tanggung jawab perempuan atas perawatan rumah memaksa banyak perempuan mencari cara untuk memperoleh penghasilan, misalnya pekerjaan rumahan, untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, mungkin ada banyak perempuan yang terlibat dalam pekerjaan rumahan di provinsi ini meskipun tidak ada data resmi tentang prevalensi pekerja rumahan.
- Pekerja rumahan perempuan pada umumnya memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dari pada rata-rata provinsi. Sekurang-kurangnya lebih dari seperempat perempuan yang diwawancarai memiliki pendidikan sekolah dasar (SD) di semua provinsi sasaran dan seperempat lainnya memiliki pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).
- Lebih dari 80 persen perempuan tersebut berstatus menikah. Ukuran rata-rata rumah tangga pekerja rumahan adalah antara 4 dan 5 orang yang sedikit lebih tinggi dari pada rata-rata nasional dan provinsi. Suami pekerja rumahan biasanya ditemukan memiliki pekerjaan lepas atau jangka pendek dalam bidang pekerjaan berketerampilan dan tidak berketerampilan, yang menunjukkan bahwa rumah tangga pekerja rumahan mungkin tidak memiliki pendapatan yang stabil dan pendapatan dari pekerjaan rumahan adalah penting.
- Penelitian ini menemukan perempuan penyandang disabilitas di antara pekerja rumahan di seluruh provinsi kecuali Yogyakarta. Proporsi perempuan penyandang disabilitas di 5 provinsi tersebut adalah rata-rata sekitar 1 persen.
- Banyak pekerja rumahan perempuan tidak memiliki persepsi kesetaraan gender terutama dalam hal pengambilan keputusan di dalam rumah tangga.
- Masuk ke dalam pekerjaan rumahan bersifat informal dan melalui jaringan sosial misalnya teman dan kerabat. Lebih dari 50 persen perempuan diperkenalkan dengan pekerjaan rumahan oleh tetangga.
- Mayoritas menunjukkan bahwa pekerjaan rumahan merupakan kegiatan perekonomian utama dan sumber utama pendapatan mereka. Lazim bahwa pekerja perempuan mendapatkan bantuan dari anggota keluarga rumah tangga lainnya termasuk anak-anak untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.

- Pekerja rumahan perempuan rata-rata bekerja sebagai pekerja rumahan selama sekitar 6 tahun, meskipun lamanya bekerja sebagai pekerja rumahan rentangnya berkisar sangat lebar dengan yang terlama adalah 25 tahun.
- Lima puluh persen pekerja rumahan mengindikasikan bahwa mereka ingin mendirikan usaha sendiri jika diberi pilihan. Dua puluh persen menyatakan mereka akan lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Hanya sebagian kecil dari sampel yang tertarik untuk menjadi pekerja di sektor formal atau melanjutkan pendidikan. Diskusi kelompok terarah menyoroti bahwa banyak perempuan lebih memilih untuk tinggal di rumah untuk memenuhi tanggung jawab perawatan rumah tangga mereka atau memiliki pekerjaan yang memberi mereka fleksibilitas yang sama dengan yang mereka miliki sebagai pekerja rumahan.
- Pekerja rumahan ditemukan di beragam sektor dan industri termasuk pengolahan makanan, tekstil, pakaian jadi, kulit, kayu, dan lain-lain, yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Sebagian kecil perempuan tersebut bekerja di kerajinan.
- Hampir semua perempuan tersebut bekerja tanpa kontrak tertulis. Empat puluh tujuh persen dari perempuan tersebut menyatakan bahwa mereka bekerja di bawah perjanjian lisan dan 53 persen menyatakan mereka tidak memiliki perjanjian.
- Lokasi kerja untuk sebagian besar pekerja rumahan adalah rumah mereka sendiri atau di rumah teman. Hanya sebagian kecil mengindikasikan tempat kerja mereka sebagai sebuah struktur yang melekat pada rumah mereka misalnya halaman atau garasi.
- Para perempuan tersebut bekerja sesuai dengan pesanan dan spesifikasi oleh pemberi kerja atau perantara mereka tetapi mereka jarang mendapatkan pelatihan. Pemberian spesifikasi yang paling umum adalah di bidang produksi barang terkait dengan pasar internasional. Dalam hal pelatihan diberikan, itu adalah pelatihan sambil bekerja yang sebagian besar informal untuk mengajarkan bagaimana pekerjaan tersebut harus diselesaikan untuk memenuhi spesifikasi, dan tidak untuk meningkatkan keterampilan para pekerja.
- Mayoritas perempuan menerima bahan baku dari pemberi kerja mereka meskipun ada juga kasus di mana pekerja rumahan membeli sebagian atau seluruh bahan baku. Kurang lazim pekerja rumahan mendapatkan peralatan dari pemberi kerja/perantara mereka. Lebih dari 70 persen pekerja menyatakan mereka tidak pernah menerima kompensasi atas biaya yang berkaitan dengan produksi. Dua persen pekerja diminta untuk membayar deposit untuk bahan dan peralatan yang mereka terima.
- Hampir 60 persen pekerja rumahan memiliki sedikit pengetahuan tentang perusahaan yang mempekerjakan mereka atau yang memberikan pesanan produksi. Penelitian ini juga menegaskan adanya pekerja rumahan dalam rantai pasokan global dengan 18 persen pekerja menyatakan bahwa produk mereka dijual di pasar internasional.
- Jumlah jam kerja pekerja rumahan lebih panjang dari pada rata-rata perempuan. Mereka cenderung bekerja dengan jam kerja lebih pendek per hari, tetapi lebih banyak hari per minggu dibandingkan dengan rata-rata perempuan. Para pekerja rumahan sebagian besar terbagi ke dalam dua jenis, yaitu mereka yang bekerja paruh waktu dan mereka yang bekerja dengan jam kerja berlebihan (lebih dari 48 jam per minggu). Banyak pekerja

rumahan ingin bekerja lebih karena mereka dibayar dengan besaran upah per satuan dan mereka melihatnya sebagai satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan mereka.

- Pekerja rumahan dibayar dengan besaran upah per satuan dan besaran upah per satuan pada umumnya dikendalikan oleh pengusaha tanpa negosiasi. Sebagian besar dari mereka *enggan* bernegosiasi karena takut kehilangan pekerjaan.
- Pendapatan pekerja rumahan cenderung tepat di atas garis kemiskinan namun di bawah upah minimum. Mereka merupakan salah satu pekerja dengan upah terendah dalam rantai produksi, sebagaimana terbukti dari perbandingan upah rata-rata pekerja di sektor manufaktur.
- Banyak pekerja rumahan mengalami keterlambatan dalam menerima gaji. Fakta bahwa pekerja rumahan mengalami keterlambatan pembayaran menunjukkan bahwa mereka menanggung beberapa tanggung jawab atas biaya produksi, yang bisa membuat mereka lebih rentan dalam jangka waktu sementara.
- Keuntungan utama pekerjaan rumahan yang disampaikan oleh perempuan adalah bahwa mereka bisa memperoleh penghasilan, dan bahwa pekerjaan rumahan memungkinkan mereka mengerjakan kegiatan ekonomi atau perawatan lainnya.
- Tantangan utama yang disampaikan oleh pekerja rumahan adalah penghasilan yang rendah dan pesanan kerja yang tidak stabil. Sebagian menyampaikan bahwa terbatasnya ruang di rumah juga merupakan tantangan. Rumah mereka menjadi tempat kerja mereka, ruangan mereka mungkin dipenuhi oleh bahan baku dan produk jadi. Ini bisa berbahaya karena sebagian bahan mungkin berbahaya. Karena mereka tidak memiliki kontrak tertulis, mereka juga khawatir bahwa pekerjaan tersebut bisa lenyap kapanpun. Ini juga membuat pekerja rumahan *enggan* bernegosiasi tentang meningkatkan kondisi kerja mereka.
- Sementara sebagian besar pekerja rumahan dilaporkan berada dalam kondisi sehat, mereka masih memiliki keluhan terkait kesehatan dan menyampaikan bahwa mereka seringkali tetap bekerja saat cedera atau sakit dan jarang mengambil jeda dari kegiatan kerja, karena beristirahat berakibat langsung pada hilangnya pendapatan. Mereka khawatir perantara mungkin mengurangi atau memutus pesanan kerja jika mereka istirahat bekerja. Ini menimbulkan kekhawatiran umum atas kesehatan pekerja rumahan.
- Pekerja rumahan terbatas aksesnya ke program bantuan sosial dan asuransi sosial Pemerintah.
- Pekerja rumahan tidak terhubung dengan baik dengan kelompok yang mendukung hak-hak di tempat kerja. Kelompok paling umum yang diikuti oleh pekerja rumahan adalah kelompok keagamaan tradisional, yang biasanya tidak memberikan platform untuk diskusi tentang isu-isu terkait pekerjaan. Pekerja rumahan *enggan* bernegosiasi untuk kondisi kerja yang lebih baik karena tingginya kerentanan. Ketika pekerja rumahan yang bernegosiasi mereka seringkali melakukannya secara perorangan tanpa persiapan yang memadai. Ini menghantarkan pada hasil yang tidak optimal.

Rekomendasi

Karena pekerja rumahan bekerja untuk mendukung mata pencaharian mereka dan kesejahteraan keluarga mereka, maka penting untuk mengakui mereka sebagai pekerja dan berjuang menuju penanganan defisit kerja layak yang dihadapi oleh pekerja rumahan. Dalam mempromosikan kerja layak bagi pekerja rumahan, tindakan harus diambil oleh para pemangku kepentingan terkait untuk membawa perubahan positif pada berbagai tingkatan berbeda termasuk di tingkat kebijakan maupun di tingkat masyarakat. Karena mayoritas pekerja rumahan adalah perempuan, promosi kerja layak untuk pekerja rumahan merupakan bidang kerja penting dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di Indonesia. Meningkatkan kondisi kerja pekerja rumahan dapat membawa dampak positif saat Indonesia berjuang menuju pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan secara sosial. Dalam upaya ini, rekomendasi berikut diberikan dalam menanggapi tantangan yang dihadapi oleh pekerja rumah:

1. Kumpulkan data tentang pekerja rumahan

Ada kebutuhan untuk memiliki data tentang pekerja rumahan guna untuk lebih memahami prevalensi dan kondisi kerja para pekerja ini di Indonesia. Pekerja rumahan saat ini tidak terlihat di dalam statistik dan pengumpulan data tentang mereka dapat membantu meningkatkan keterlihatan pekerja rumahan dan kontribusi yang mereka berikan terhadap perekonomian.

Menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia, kuesioner survei angkatan kerja baru yang akan digunakan sejak tahun 2016 akan mencakup beberapa pertanyaan baru yang mencakup tempat kerja. Ini merupakan perkembangan positif karena ini merupakan langkah penting untuk memungkinkan identifikasi kategori pekerjaan termasuk pekerjaan berbasis rumahan. Pengumpulan data tentang berbagai kategori pekerja termasuk pekerja berbasis rumahan harus dimapankan sehingga data dapat tersedia untuk pengembangan kebijakan dan program dan pemantauan dan evaluasi kondisi kerja para pekerja ini. Setelah data terkumpul, hasil harus disebarluaskan untuk digunakan lebih lanjut oleh para pemangku kepentingan terkait, termasuk pembuat kebijakan dan pekerja rumahan.

Selain itu, penelitian lain dapat dilakukan bila diperlukan untuk membangun sebuah dasar bukti untuk mempromosikan kerja layak bagi pekerja rumahan.

2. Berdayakan pekerja rumahan untuk menangani defisit kerja layak melalui peningkatan kesadaran, pelatihan, dan pembentukan dan manajemen kelompok

Memberdayakan pekerja rumahan untuk mengambil tindakan untuk meningkatkan kondisi hidup dan kerja mereka merupakan bagian penting dalam mempromosikan kerja layak bagi pekerja rumahan. Karena sebagian besar pekerja rumahan memiliki tingkat pendidikan rendah dan pemahaman terbatas tentang isu-isu yang berdampak pada mereka, maka penting bahwa pekerja rumahan didukung untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat kapasitas untuk menangani kondisi kerja di bawah standar melalui:

- Peningkatan kesadaran tentang:
 - Kesetaraan gender dan non-diskriminasi.
 - Pekerja rumahan sebagai pekerja.

- Hak pekerja.
- Pentingnya memiliki kontrak tertulis dan menyimpan catatan.
- Pelatihan tentang berbagai topik misalnya:
 - Keselamatan dan kesehatan kerja dan rumah aman.
 - Keterampilan kepemimpinan dan negosiasi.
 - Melek finansial termasuk penghitungan besaran upah per satuan dan biaya produksi (misalnya tenaga kerja, utilitas, pengiriman produk jadi, dan lain-lain) sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut ketika negosiasi dengan pemberi kerja mereka.
 - Pembentukan dan manajemen kelompok sehingga pekerja rumahan dapat berbagi informasi, saling membantu, dan bekerja bersama untuk memperkuat suara dan perwakilan mereka.
 - Keterampilan advokasi.
- Pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan daya kerja mereka.
- Memberikan akses ke layanan keuangan (misalnya simpan pinjam) untuk mendukung perempuan dalam mengambil kendali dalam mengelola keuangan mereka sendiri.

Topik-topik peningkatan kesadaran dan pelatihan di atas telah digunakan di banyak negara untuk memberdayakan pekerja berbasis rumahan dengan hasil positif. Topik-topik lain dapat ditambahkan bila perlu untuk berkontribusi pada pemberdayaan pekerja rumahan.

Dalam penelitian ini, 50 persen pekerja rumahan mengindikasikan bahwa mereka ingin mendirikan usaha sendiri jika diberi pilihan. Para perempuan ini harus memiliki akses ke pelatihan perusahaan dan layanan dukungan lainnya (misalnya keuangan, hukum, pemasaran, jaringan, dan lain-lain) sehingga mereka dapat memulai, mengelola dan meningkatkan usaha mereka.

3. Akui pekerja rumahan sebagai pekerja melalui regulasi

Sebagai langkah untuk memperluas perlindungan efektif untuk pekerja rumahan, maka penting untuk secara resmi mengakui pekerja rumahan sebagai pekerja. Ini dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan lokal dan nasional tentang pekerjaan rumahan atau revisi undang-undang yang ada. Ini harus dilakukan melalui konsultasi erat dengan para pemangku kepentingan terkait termasuk perwakilan dari kelompok pekerja rumahan. Berbagai pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mengamankan komitmen politik untuk mengakui pekerja rumahan sebagai pekerja. Konvensi ILO tentang Pekerjaan Rumahan, 1996 (No. 177) yang belum diratifikasi oleh Indonesia, dan Rekomendasi Pekerjaan Rumahan, 1996 (No. 184) memberikan prinsip-prinsip dasar dan pedoman dalam mempromosikan kerja layak bagi pekerja rumahan.

4. Perluas perlindungan sosial kepada pekerja rumahan

Meskipun banyak program bantuan sosial dan asuransi sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan melindungi penduduk usia kerja di Indonesia, mayoritas pekerja rumahan ditemukan tidak memiliki akses ke program-program tersebut. Karena pekerja rumahan sebagian besar dibayar berdasarkan satuan yang mereka selesaikan, hilangnya hari-hari kerja karena sakit atau cedera memiliki dampak negatif pada pendapatan mereka.

Menyadari bahwa pekerja rumahan mendapatkan upah rendah yang tepat di atas garis kemiskinan tetapi di bawah upah minimum, hilangnya hari-hari kerja berarti mereka akan segera menghadapi resiko jatuh ke dalam kemiskinan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak banyak pekerja rumahan mengakses perawatan pasca melahirkan. Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa skema perlindungan sosial penting tersedia dan dapat diakses oleh pekerja rumahan untuk melindungi mereka dari berbagai resiko.

5. Promosikan praktik bertanggung-jawab di rantai pasokan

Asosiasi-asosiasi pengusaha dan anggota serta perusahaan multinasional, nasional dan lokal lainnya di Indonesia dapat memainkan peran kunci dalam mempromosikan kerja layak bagi pekerja rumahan dengan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu pekerja rumahan dan mempromosikan praktik mempekerjakan pekerja rumahan yang bertanggung jawab. Dengan globalisasi dan meningkatnya fleksibilitas di pasar tenaga kerja, rantai produksi menjadi kompleks, dan menjadi lebih sulit untuk mendapatkan gambaran penuh semua bagian rantai pasokan. Pekerja rumahan seringkali ditemukan bekerja di bagian terbawah rantai pasokan, melaksanakan pekerjaan produksi sederhana untuk produk yang masuk ke pasar lokal, nasional dan internasional. Mempromosikan kerja layak untuk pekerja rumahan bukan hanya merupakan hal yang benar untuk dilakukan, tetapi juga sangat penting untuk rantai pasokan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, tindakan-tindakan berikut direkomendasikan:

- Panggilah perusahaan multinasional, nasional dan lokal, pembeli internasional dan pembeli lainnya, pengecer dan lain-lain untuk mendaftar dan mematuhi standar internasional tentang pekerja rumahan melalui pengembangan dan pelaksanaan kode etik atau pedoman. Inisiatif Perdagangan Etis (*Ethical Trading Initiative*, ETI), sebuah aliansi perusahaan, menyediakan panduan dan studi kasus yang berguna (<http://www.ethicaltrade.org/>).
- Ambillah peran proaktif dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu pekerja rumahan di kalangan pelaku usaha termasuk perantara di Indonesia sehingga mereka dapat mempromosikan kepatuhan yang lebih baik terhadap standar ketenagakerjaan di kalangan pekerja rumahan.
- Terapkan berbagai langkah untuk meningkatkan kondisi kerja dan produktivitas pekerja rumahan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Pembayaran upah yang adil dan pembayaran upah tepat waktu.
 - Ketersediaan pesanan kerja yang stabil.
 - Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerja rumahan.
 - Pelatihan keterampilan untuk pekerja rumahan.
 - Penyediaan bahan, perlengkapan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan.
 - Pembayaran upah reguler tanpa penangguhan.
 - Memberikan akses pekerja rumahan ke perlindungan sosial.

6. Promosikan kesetaraan gender dan non-diskriminasi di kalangan masyarakat umum, pengambil kebijakan, perusahaan dan asosiasi pengusaha, serikat pekerja, dan

organisasi terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi perempuan serta laki-laki untuk mengakses kerja layak

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu alasan utama bagi perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan rumahan adalah fleksibilitas pekerjaan rumahan untuk memungkinkan perempuan mengurus tanggung jawab rumah tangga sementara memperoleh penghasilan. Selain itu, di Indonesia, partisipasi angkatan kerja perempuan pada umumnya rendah dengan banyak perempuan menyebut tanggung jawab rumah tangga sebagai alasan utama menjadi tidak aktif secara ekonomi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pekerja rumahan pada umumnya tidak memiliki persepsi tentang kesetaraan gender, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi kesetaraan gender dan peran gender sangat mempengaruhi bagaimana perempuan bekerja, yang membatasi potensi mereka. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan mengubah norma-norma terkait dengan peran tradisional perempuan dan laki-laki baik untuk perempuan maupun laki-laki adalah diperlukan di rumah tangga, masyarakat, dan di tingkat nasional untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi perempuan untuk mengakses kerja layak.

Isu-isu gender harus diarusutamakan dalam regulasi lokal dan nasional. Bila kelompok masyarakat ada, kelompok-kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk membahas isu-isu gender dan mempromosikan kesetaraan gender di rumah maupun di masyarakat.

Daftar referensi

E. Allen (2013), "Labour and social trends in Indonesia 2013: Reinforcing the role of decent work in equitable growth", (ILO, Jakarta).

Allen, E. (2015), "Labour and social trends report: Strengthening competitiveness and productivity through decent work", (ILO, Jakarta).

H. Aswicahyono, H. Hill dan D. Narjoko (2010), "Industrialisation after a Deep Economic Crisis: Indonesia, Journal of Development Studies", "The Journal of Development Studies" (Routledge).

BPJS Ketenagakerjaan (2014), "Laporan Tahunan", (BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta).

BPS (2014), "Situasi angkatan kerja di Indonesia, Agustus 2014", (Badan Pusat Statistik, Jakarta).

BPS (2014), "Survei angkatan kerja, Agustus 2014", (Badan Pusat Statistik, Jakarta).

BPS (2014), "Survei perusahaan besar dan menengah di sektor manufaktur, 2013", (Badan Pusat Statistik, Jakarta).

Y.K. Che dan J. Sakovics (2008), "Hold-up problem, The new palgrave dictionary of economics", (New York).

M. Chen (2014), "Informal Economy Monitoring Study Sector Report: Home-Based Workers, WIEGO Secretariat", (Cambridge, USA).

D. de Vaus (2002), "Surveys in Social Research (Fifth edition)", (Allen and Unwin, Crows Nest).

M. Fajerman (2014), "Review of the Regulatory Framework for Homeworkers in Indonesia", (ILO, Jakarta).

D. Grimshaw (2011), "What do we know about low-wage work and low-wage workers? Analysing the definitions, patterns, causes and consequences in international perspective, Conditions of Work and Employment Series No. 28", (ILO, Jenewa).

ILO (1996), "Convention on Home Work (No. 177)", (ILO, Jenewa)

ILO (2001), "Report of the Director-General: Reducing the decent work deficit - a global challenge", (ILO, Geneva).

ILO (2012), "Decent work indicators: concepts and definitions", (ILO, Jenewa).

Department of Statistics ILO (2010), "Model labour force survey questionnaire (version A)", (ILO, tidak dipublikasikan, Jenewa).

ILO (2015), "Indonesia: Homework in Jawa Timur - Findings from a qualitative study", (ILO, Jakarta).

L. Lim (2015), "Extending livelihood opportunities and social protection to empower poor urban informal workers in Asia. A multi-country study: Bangladesh, Indonesia, Nepal, Pakistan, Philippines, and Thailand", (Oxfam for Asia Development Dialogue, Thailand).

D. McCormick dan H. Schmitz (2001), "Manual for value chain research on homeworkers in the garment industry", (HomeNet International, New Delhi).

S. Mehrotra dan M. Biggeri (eds) (2007), "Asian informal workers: Global risks, local protections", (Routledge, London dan AS).

Kementerian Kesehatan (2014), "Laporan situasi HIV/AIDS di Indonesia", (Kementerian Kesehatan, Jakarta).

N. Haspels; A. Matsuura (2015), "Home-based workers: Decent work and social protection through organization and empowerment. Experiences, good practices and lessons from home-based workers and their organizations", (Jakarta, ILO).

WHO (2005), "A WHO multi-country study on women's health and life experiences", (World Health Organization, Jenewa).